

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2023 Triwulan IV telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi untuk kemudian dilaporkan kepada kepala daerah (Wali Kota) dan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Evaluasi RKPD merupakan rekapitulasi hasil pencapaian kinerja dan anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk dijadikan pedoman penyusunan perencanaan berikutnya.

Masukan dan saran membangun dalam rangka perbaikan dokumen ini sangat kami harapkan agar dokumen ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini baik secara langsung maupun tidak langsung, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Sukabumi, Januari 2024

Kepala Bappeda Kota Sukabumi

ASEP SUHENDRAWAN, S.Sos.,M.A.P.

NIP. 19660927 198803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penyajian Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI.....	9
2.1 Visi dan Misi.....	9
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	10
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	12
2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023.....	13
BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 TRIWULAN IV.....	65
3.1 Capaian Kinerja Sasaran.....	66
3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.....	70
3.2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	70
3.2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan per Urusan Pemerintahan.....	72
3.3 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional.....	96
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....	98
4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.....	98
4.2 Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan RKPD berikutnya.....	99
BAB V P E N U T U P.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Rekomendasi.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perwujudan Visi Kota Sukabumi 2018-2023	9
Tabel 2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	10
Tabel 3 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran tahun 2023.....	14
Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kerja.....	65
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/Sasaran Tahun 2022	66
Tabel 6 Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	70
Tabel 7 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan per Urusan Tahun 2023.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Capaian IKU tahun 2020 berdasarkan Kriteria.....	69
Gambar 2 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 Triwulan IV.....	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka. Adapun dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. RKPD ini adalah rencana program dan/atau kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat perangkat daerah yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Dokumen RKPD sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi Tahun 2023; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Dokumen RKPD Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang dalam proses penyusunannya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional dan daerah yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. *Top down* yaitu pendekatan yang memperhatikan program- program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
2. *Bottom-up* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (FPD), dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan berupa matrik program dan kegiatan prioritas sampai dengan Acara Puncak Musrenbang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022.
3. Teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan hasil kajian dan evaluasi periode sebelumnya berbasis pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.

4. Politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya Pokok-pokok Pikiran (Pokir) atau hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.
5. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
6. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.
7. Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah di Kota Sukabumi dan nilai-nilai kearifan lokal.
8. Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan- kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program- program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar perangkat daerah di tingkat provinsi/kabupaten.
9. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan, lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu perangkat daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.
10. Pendekatan spasial dalam tahapan perencanaan pembangunan, digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/kota.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 Triwulan IV juga menerapkan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*).
2. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat/umat, Pinjaman Daerah, CSR, KPBU dan Obligasi Daerah.
3. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, proses penyusunan RKPDP Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPDP Tahun 2023 dengan berpedoman kepada sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 dan RKPDP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Forum Perangkat Daerah Tingkat Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat, hasil evaluasi RKPDP Kota Sukabumi Tahun 2021 dan 2022, dan secara simultan dilakukan telaahan rancangan Renja Tahun 2023 melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan RKPDP dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD atau Hasil reses DPRD serta Musrenbang Tingkat Kota.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2023, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda, Perangkat Daerah, memperhatikan Pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendapat dari kalangan akademisi, dunia usaha dan komunitas.
4. Penetapan RKPDP, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2023, hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kota Sukabumi serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPDP Kota Sukabumi Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan RKPDP Tahun 2023, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan penanganan pemulihan ekonomi pasca *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Seperti dipahami bahwa penyebaran *COVID-19* telah menjadi masalah kesehatan dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan *COVID-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi.

Kondisi diatas memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2023. Banyaknya pergeseran anggaran (*refocussing*) untuk penanganan penyebaran *COVID-19* berdampak terhadap perubahan indikator output dan outcome yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDP Tahun 2023 Triwulan IV, beberapa perangkat daerah belum mampu merealisasikan program kegiatannya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan kondisi pandemi, beberapa target yang ditetapkan mengalami perubahan, sehingga walaupun nanti terpenuhi di akhir tahun tapi tidak banyak berkontribusi terhadap perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 dan terhadap sasaran pembangunan tahunan nasional. Hal ini juga yang mendorong Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan perubahan RPJMD.

Evaluasi RKPDP penting untuk dilaksanakan agar dapat memastikan target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPDP dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka

menengah daerah, dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi RKPD dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah masing-masing, untuk kemudian disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. Evaluasi RKPD ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Evaluasi RKPD, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Perubahan PP Nomor 72 Tahun 2019;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan yang bersifat aspiratif dan terpadu yang bersumber dari berbagai pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan yang sinergi dan efisien. Penyusunan RKPD disesuaikan dengan alokasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dan diharapkan akan memberi arah rencana kerja pembangunan di Tahun 2023 bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan sasaran RPJMD dan renstra Perangkat Daerah terkait. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 telah mempertimbangkan isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi proses pembangunan di Tahun 2023, serta telah mempertimbangkan arah kebijakan dan target indikator kinerja pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota Sukabumi Tahun 2023. Oleh sebab itu hasil pelaksanaan RKPD perlu ada pengendalian dan evaluasi.

Maksud dari evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan IV adalah untuk menilai dan mengevaluasi sebagai berikut:

1. Pencapaian target-target rencana program kegiatan perangkat daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2023 Triwulan IV;
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam APBD Kota Sukabumi Tahun 2023 Triwulan IV.

Tujuan dari evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan IV, adalah:

1. Memberikan gambaran *progress* pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah per triwulan hingga akhir tahun 2023 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2023 berdasarkan realisasi anggaran;
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga akhir tahun 2023 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2023;
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD mulai triwulan I hingga triwulan IV sebagai sistem evaluasi yang harus dilakukan untuk mengendalikan pencapaian tujuan;
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Dalam penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan IV ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

Bab ini berisi tentang visi dan misi daerah, tujuan dan sasaran, prioritas pembangunan daerah, dan program dan kegiatan pembangunan.

3. BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 TRIWULAN IV

Bab ini menjelaskan hasil capaian kinerja pembangunan berdasarkan kinerja sasaran, program dan kegiatan, dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

4. **BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Bab ini berisi faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja, dan tindak lanjutnya bagi pelaksanaan RKPD berikutnya.

5. **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan IV.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

2.1. GAMBARAN UMUM

Kota Sukabumi merupakan sebuah kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Kota Sukabumi dengan luas 48,33 km² berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Secara administratif, Kota Sukabumi terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Adapun luas dataran masing-masing kecamatan yaitu Baros (5,58 km²), Lembursitu (10,69 km²), Cibeureum (9,12 km²), Citamiang (4,01 km²), Warudoyong (7,56 km²), Gunungpuyuh (5,15 km²), dan Cikole (6,22 km²).

Visi pembangunan jangka menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan Daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Daerah, adalah **“Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera.”**

Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 1 Perwujudan Visi Kota Sukabumi 2018-2023

VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
	RELIGIUS	Pembangunan Kota Sukabumi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang memiliki sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.

TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA	NYAMAN	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Sukabumi pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.
	SEJAHTERA	Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023, Bappeda 2023

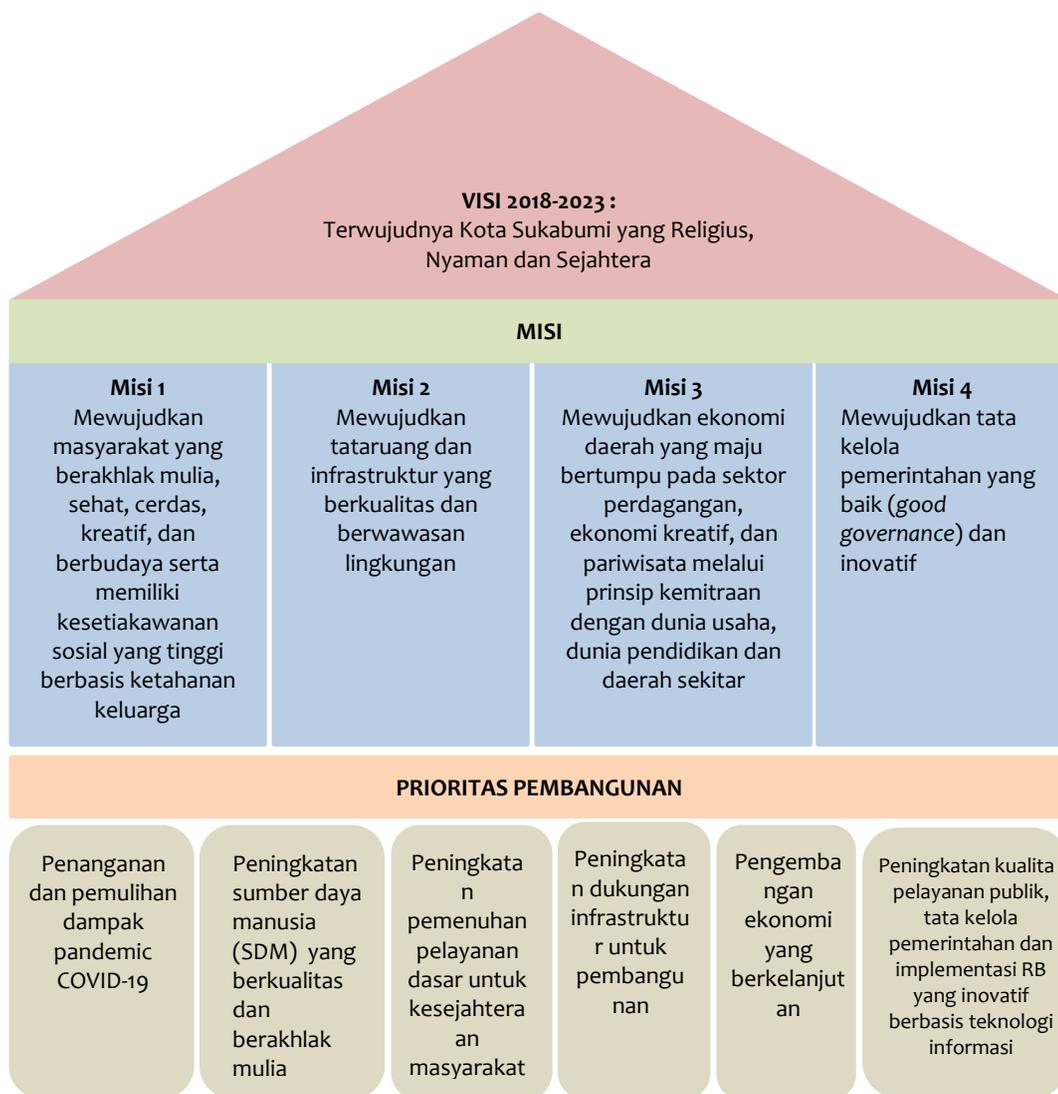
Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.
2. Mewujudkan Tataruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif

Berdasarkan proses perencanaan terintegrasi yang sudah dirumuskan untuk mencapai masing-masing misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dilihat bahwa pembangunan Daerah sudah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatas, Kota Sukabumi dan tentunya semua pemerintah daerah di Indonesia bahkan dunia dihadapkan pada tantangan kondisi Pandemi Covid-19 yang sejak Tahun 2020 ditetapkan dan sampai sekarang masih terkena dampaknya. Dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Menyikapi hal tersebut maka bertepatan dengan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023, Kota Sukabumi melakukan perubahan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan dimana menambahkan satu prioritas yaitu dalam rangka penanganan dan pemulihan Covid-19. Apabila kita gambarkan kondisi Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 akan terlihat seperti gambar dibawah ini:



2.2. ISU STRATEGIS

Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Sukabumi tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	
1		2	
VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA			
1	MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA		
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	
1		2	
1.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama

1.1.1	MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama
1.1.2	MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a.	Indeks Rasa Aman
1.2	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN	a.	Angka Harapan Hidup
1.2.1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a.	Indeks Keluarga Sehat
1.3	MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	a.	Indeks Pendidikan
1.3.1	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU	a.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
1.3.2	MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA KOTA SUKABUMI	a.	Indeks Pembangunan Pemuda
1.4	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	a.	Indeks Ketahanan Keluarga
1.4.1	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	a.	Indeks Pembangunan Gender
1.4.2	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a.	Indeks Ketahanan Keluarga
2	MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN		
2.1	MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN	a.	Indeks Kota Layak Huni
2.1.1	TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	a.	Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni
		b.	Persentase penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup
		c.	Persentase penilaian Aspek transportasi
		d.	Persentase penilaian Aspek Fasilitas
		e.	Persentase penilaian Aspek Utilitas
2.1.2	TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN	a.	Persentase Pengurangan Risiko Bencana
2.1.3	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2.1.4	TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	a.	Persentase Kawasan Kumuh
3	MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR		
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	
1		2	
3.1	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN	a.	Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB
3.1.2	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN	a.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
3.1.3	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN	a.	Persentase Ketersediaan LP2B
		b.	Skor Pola Pangan Harapan
		c.	Persentase Keamanan Pangan
4	MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF		
4.1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	a.	Indeks Reformasi Birokrasi
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a.	Nilai SAKIP
		b.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a.	Indeks Pelayanan Publik
		b.	Indeks Kepuasan Masyarakat
4.1.3	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK	a.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4.2	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	a.	Indeks Inovasi Daerah
4.2.1	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a.	Presentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023, Bappeda 2023

Isu strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
2. infrastruktur dan tata kota;
3. daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. kualitas lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
6. dampak pandemi covid 19.

2.3 STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan misi pembangunan RPJMD. Tema pembangunan RKP Kota Sukabumi Tahun 2023 sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, yakni:

“ Mencapai Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera ”

Tema di atas memiliki makna bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan pada Tahun 2023 harus ditujukan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kota Sukabumi dari berbagai sektor, sehingga terciptanya masyarakat yang unggul sesuai bidangnya serta sejahtera dari berbagai aspek kehidupan. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut tentunya akan dapat dicapai dengan percepatan pembangunan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dari berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, infrastruktur dan bidang lainnya sehingga dapat mendorong pencapaian kualitas kehidupan

masyarakat yang unggul dari segala bidang sehingga dapat mewujudkan Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera terutama melalui pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh unsur masyarakat.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 disusun berdasarkan isu strategis dan memperhatikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terutama melalau program unggulannya, pokok-pokok pikiran tahunan DPRD serta strategi dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan Daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran RPJMD. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Berdasarkan hal tersebut, serta mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018–2023, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 ditambahkan 1 (satu) prioritas pembangunan guna mempercepat penanganan dan pemulihan akibat pandemi Covid-19, sehingga dari semula terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan menjadi 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan dengan tetap memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	
1	kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;	1	peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2	infrastruktur dan tata kota;	2	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
3	daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;	3	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4	kualitas lingkungan hidup;	4	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan
5	penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan	5	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	
6	dampak pandemi covid 19.	6	penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19

2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023 DAN ARAH KEBIJAKAN

Prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan perubahan RKPd Kota Sukabumi Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui 71 (tujuh puluh satu) arah kebijakan sebagai berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
1	peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
		2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama
		3	Meningkatkan aktivitas keagamaan
		4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
		5	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter
		6	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal
		7	Meningkatkan Kreasi masyarakat
		8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga
		9	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		10	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender
		11	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial
		12	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga
		13	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat
		14	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan
		15	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup
		16	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi
		17	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
		18	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
2	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi	19	Perluasan implementasi sistem terintegritas
		20	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
		21	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
		22	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT
		23	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19
		24	penguatan pelayanan terpadu
		25	peningkatan profesionalisme ASN
		26	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
		27	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
		28	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE
		29	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
		30	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)
		31	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan
		32	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional
33	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi		
34	Implementasi pemanfaatan inovasi		
35	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda		
3	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	36	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		37	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan
		38	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan
		39	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas
		40	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
		41	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
		42	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana
		43	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response
		44	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)
		45	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban
4	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	46	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah
		47	meningkatkan pembangunan infratraktur diwilayah yang tertinggal
		48	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur
		49	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang
		50	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang
		51	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang
		52	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
		53	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran
		54	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup
5	Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	55	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah
		56	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
		57	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja
		58	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif
		59	Menciptakan Wirausaha muda Baru
		60	Mengembangkan Produk unggulan daerah
		61	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan
		62	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)
		63	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
		64	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
		65	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
		66	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif
		67	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
		68	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah
6	penanganan dan pemulihan dampak pandemi <i>Covid-19</i>	69	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19
		70	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak <i>Covid-19</i>
		71	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi <i>Covid-19</i>

BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

TRIWULAN IV

Metode evaluasi RKPD ini menggunakan pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Gap Analysis merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan (*gap*) antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. *Gap Analysis* itu sendiri merupakan bagian dari metode IPA (*Importance-Performance Analysis*). Metode *Importance Performance Analysis (IPA)* pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa yang dikenal pula sebagai *quadrant analysis*. *Importance Performance Analysis* digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut.

Penilaian rata-rata capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 diklasifikasikan pada kriteria sebagai berikut:

Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai	Kriteria	Warna Kriteria
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Blue
2	76 ≤ 90	Tinggi	Green
3	66 ≤ 75	Sedang	Yellow
4	51 ≤ 65	Rendah	Orange
5	≤ 50	Sangat Rendah	Red

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Pemerintah Kota Sukabumi telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Unit (IKU) Kota Sukabumi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang RPJMD Perubahan Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, memiliki indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas), indikator kinerja tersebut terdiri dari 6 indikator untuk Misi I, 4 indikator untuk Misi II, 4 indikator untuk Misi III, dan 5 indikator untuk Misi IV.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Pada tahun 2023, capaian indikator sasaran belum dapat dilaporkan karena prosesnya masih berjalan hingga akhir tahun nanti, sehingga untuk kondisi saat ini yaitu hingga akhir triwulan IV capaiannya masih 0 (nol). Adapun pengukuran IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/Sasaran Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TAHUN 2022			KETERANGAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Misi 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA									
1.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKUALITAS YANG BERAKHLAK MULIA	a.	Indeks rasa aman	Persen	75,31	64,6	75,91	100	Sangat Tinggi
		b.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,6	74,6	75,4	100	Sangat Tinggi
1.1.1.	MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,9	78,02	78,10	100	Sangat Tinggi
1.1.2.	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,29	0,317	0,318	100	Sangat Tinggi
1.1.3.	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG	a.	Indeks Pendidikan	Angka	70,42	69,83	71,55	100	Sangat Tinggi

	BERMUTU DAN MERATA								
1.1.4.	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	a.	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	27,93	48,8	49,01	100	Sangat Tinggi
1.1.5.	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK	a.	Indeks pembangunan gender	Angka	91,58	91,25	91,83	100	Sangat Tinggi
1.1.6.	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a.	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	79,5	67,96	79,63	100	Sangat Tinggi
MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN									
2.1.	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	a.	Indeks kenyamanan	Angka	22,91	24	22,46	93,89	Sangat Tinggi
2.1.1.	TERWUJUDNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN	a.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	86,2	80	86,75	100	Sangat Tinggi
		b.	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	36	40	15,10	100	Sangat Tinggi
2.1.2.	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	60,3	59	59,71	100	Sangat Tinggi
2.1.3.	TERWUJUDNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA	a.	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Point	0,49	0,53	0,53	100	Sangat Tinggi
MISI 3 : MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR									
3.1.	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG KREATIF DAN BERKELANJUTAN	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,71	5,23	5,35	100	Sangat Tinggi
3.1.1.	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	3.411,03 *	212.000*	3.322,37 *	100	Sangat Tinggi
3.1.2.	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a.	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	persen	3,64*	2	5,5	100	Sangat Tinggi
3.1.3.	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA KREATIF MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN	a.	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	2,95	1,15-1,29	3,08	100	Sangat Tinggi

	DAERAH SEKITAR								
3.1.4.	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA DAN KETERSEDIAAN PANGAN MASYARAKAT	a.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	84,8	79,99	83,9	100	Sangat Tinggi
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF									
4.1.	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	67,91	68,98	71,1	98,52	Sangat Tinggi
4.1.1.	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a.	Nilai SAKIP	Skor	76,35	79	76,7	97,08	Sangat Tinggi
		b.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
4.1.2.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,28	2,91	4,06	100	Sangat Tinggi
4.1.3.	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	a.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,98	2,4	2,98	100	Sangat Tinggi
4.2	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	a.	Skor Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Terinovatif (4675)	Terinovatif (≥ 1001)	Inovatif	100	Sangat Tinggi
4.2.1.	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a.	Indeks Daya Saing Daerah	Predikat	6,84	Tinggi	Tinggi	100	Sangat Tinggi

Sumber: IKU RPJMD Tahun 2020, Bappeda 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) IKU masuk dalam kriteria capaian sangat tinggi, dengan nilai capaiannya rata-rata sampai 100% namun dengan nilai diatas 91% secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian IKU sudah berhasil.

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Hasil capaian kinerja program dan kegiatan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Capain program dan kegiatan akan membuktikan sejauh mana efektifitas anggaran yang disediakan untuk memperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan pencapaian visi misi kepala daerah. Ketercapaian indikator program dan kegiatan akan menentukan perencanaan

pembangunan tahun yang akan datang termasuk penganggarannya. Hal ini akan menentukan apakah suatu program kegiatan tersebut masih diperlukan untuk mendukung tercapainya visi misi atau tidak dan menentukan seberapa besar anggaran yang perlu dialokasikan atau bahkan tidak perlu dianggarkan kembali.

3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah

Ketercapaian realisasi anggaran dan kinerja perangkat daerah tahun 2023 triwulan IV dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6 Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan IV

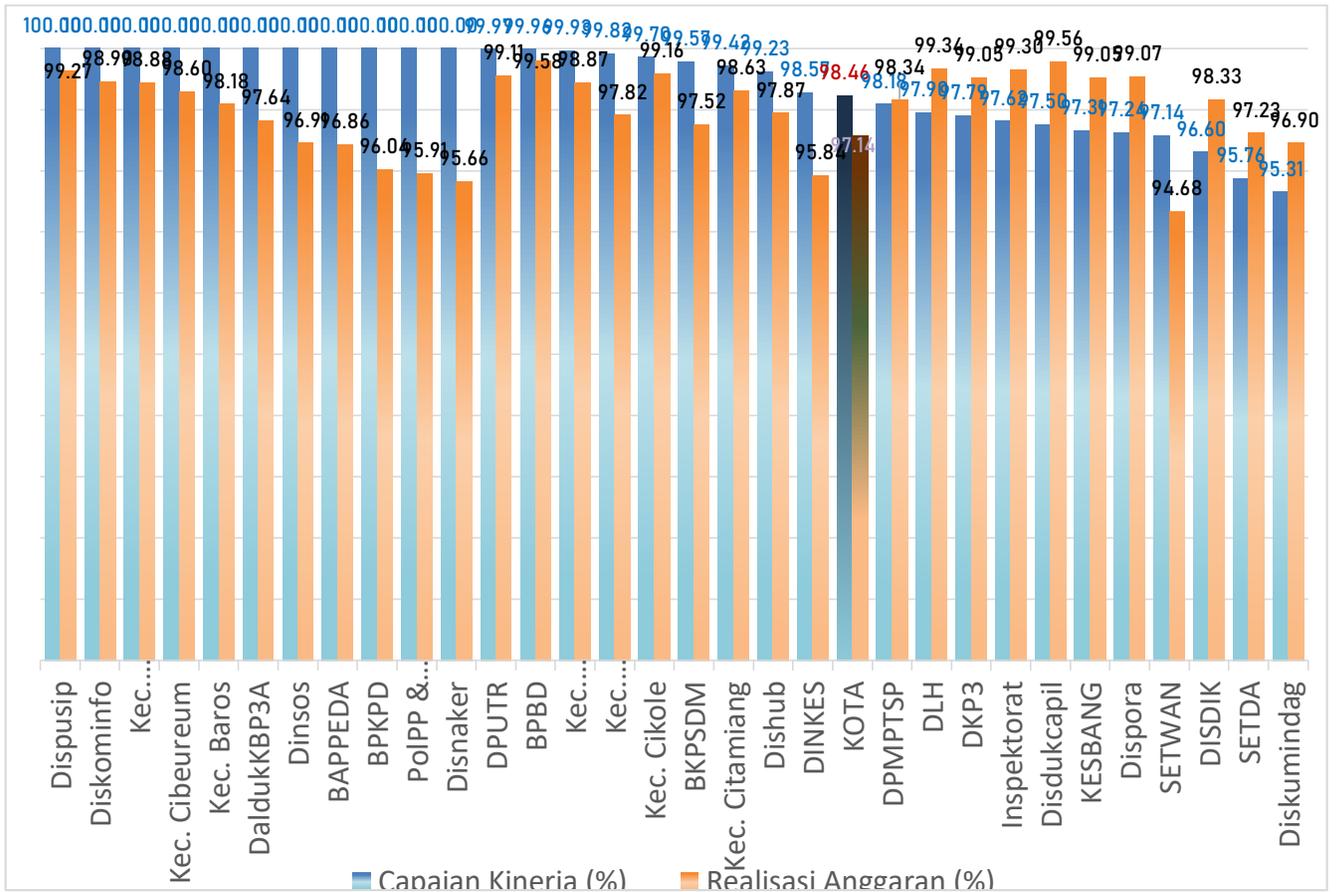
No	Perangkat Daerah	Anggaran 2023 (Rp)			Kierja	
		Pagu	Rea;isasi	%	Target	Capaian (%)
1	2	3	10	11	8	9
1	Kec. Baros	8.258.347.594	8.108.041.482	98,18	100,00	100,00
2	Kec. Cibeureum	9.208.765.969	9.079.642.142	98,60	100,00	100,00
3	Kec. Warudoyong	10.914.648.303	10.792.170.135	98,88	100,00	100,00
4	BPKPD	57.244.122.977	54.977.295.050	96,04	100,00	100,00
5	Dinsos	8.053.610.158	7.804.697.507	96,91	90,71	100,00
6	Disnaker	3.907.141.628	3.737.481.276	95,66	100,00	100,00
7	Dispusip	5.095.259.628	5.058.023.107	99,27	78,34	100,00
8	Diskominfo	5.938.196.681	5.873.113.365	98,90	100,00	100,00
9	DaldukkBP3A	12.845.006.760	12.542.393.333	97,64	84,972	100,00
10	PolPP & Damkar	12.007.840.038	11.516.923.465	95,91	100	100,00
11	DKP3	13.200.725.822	13.075.680.239	99,05	76,00	100,00
12	BAPPEDA	16.090.782.425	15.585.026.804	96,86	62,50	100,00
13	BPBD	3.584.587.590	3.569.431.271	99,58	99,96	99,96
14	Kec. Lembursitu	10.029.232.742	9.916.113.828	98,87	99,93	99,93
15	Kec. Gunungpuyuh	9.785.452.579	9.572.300.674	97,82	99,71	99,82
16	Kec. Cikole	12.511.893.818	12.407.281.276	99,16	99,70	99,70
17	Kec. Citamiang	10.378.608.685	10.236.432.626	98,63	99,42	99,42
18	Dishub	17.991.411.166	17.608.699.473	97,87	99,23	99,23
19	DPMPSTSP	5.416.402.958	5.326.247.584	98,34	95,40	98,18

20	DLH	31.202.253.952	30.995.077.965	99,34	92,07	97,90
21	Inspektorat	9.128.251.773	9.064.045.820	99,30	54,50	97,62
22	Disdukcapil	8.046.276.788	8.011.085.541	99,56	97,50	97,50
23	SETWAN	60.077.987.238	56.881.932.813	94,68	97,14	97,14
24	DISDIK	252.070.211.679	247.865.970.342	98,33	67,02	96,60
25	SETDA	57.236.235.624	55.650.358.900	97,23	88,61	95,76
26	BKPSDM	7.454.019.586	7.269.134.851	97,52	95,46	95,46
27	Diskumindag	18.131.684.655	17.569.650.822	96,90	63,92	95,31
28	DPUTR	103.557.095.235	102.632.300.139	99,11	94,34	94,81
29	KESBANG	21.565.376.428	21.360.004.605	99,05	94,23	94,23
30	Dispora	16.377.720.552	16.225.143.732	99,07	95,69	94,03
31	DINKES	497.451.676.739	476.830.750.414	95,84	98,57	98,57
	KOTA SUKABUMI	1.314.760.827.770	1.277.142.450.581	97,14	91,13	98,42

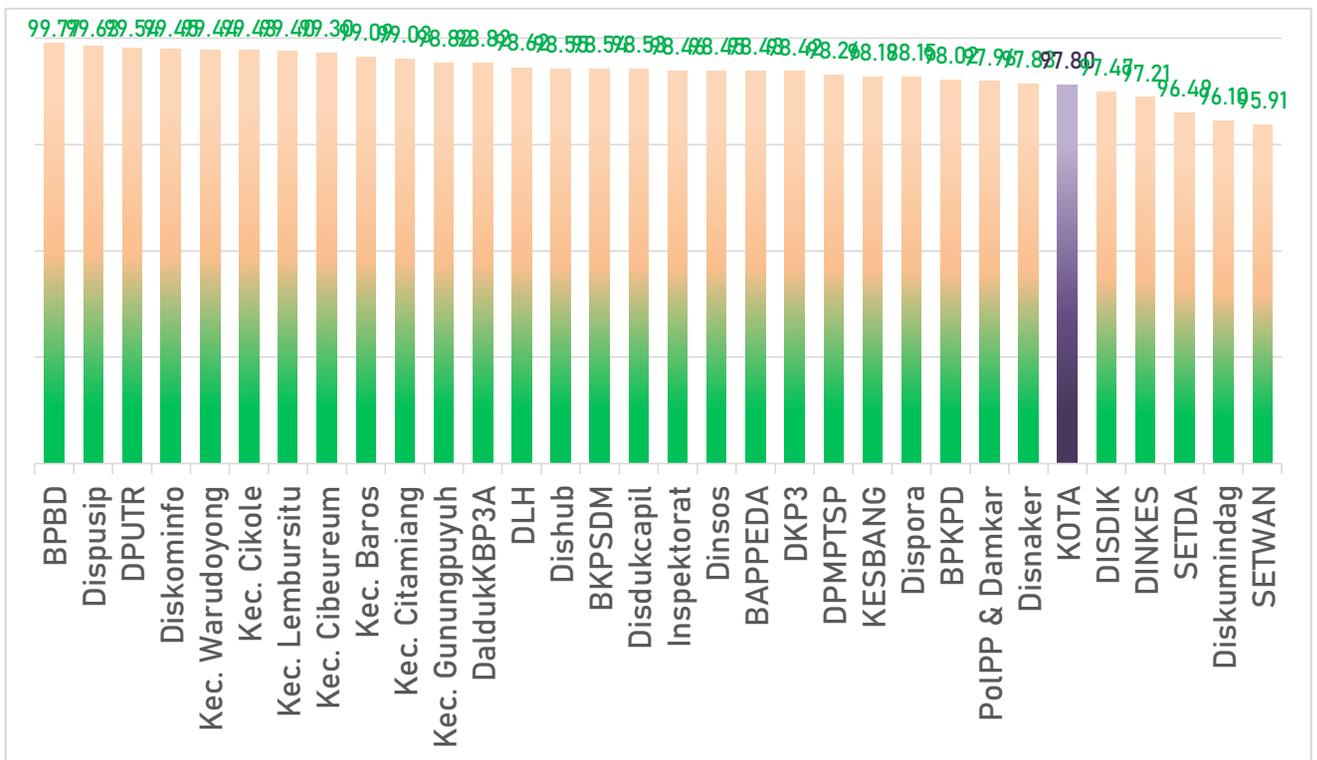
Sumber: Bappeda, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil capaian realisasi anggaran perangkat daerah tahun 2023 triwulan IV rata-rata dalam kondisi sangat tinggi. Kondisi ini masih dapat dipahami mengingat triwulan ini merupakan trwiulan terakhir pada tahun 2023. Dengan kondisi penyerapan anggaran dalam kondisi sangat tinggi maka kondisi pencapaian kinerjanya juga sangat tinggi dan ada 11 (sebelas) Perangkat Daerah yang memenuhi target (Capaian Kinerja 100%). Dari Tabel diatas bisa dilihat 11 Perangkat Daerah yang pencapaian kinerja 100% yaitu : Kecamatan Baros, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Warudoyong, BPKPD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, DaldukKB3A, Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan . Sedangkan Perangkat Daerah lainnya untuk capaian kinerja berkisar antara 99,96 % dan 98,42% dengan predikat sangat tinggi.

**CAPAIAN KINERJA OUTCOME VS REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
(PERSEN)**



**HASIL CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**



Untuk penyerapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) sebesar 99,58% menjadi perangkat daerah yang mampu menyerap anggaran tertinggi pada triwulan IV ini, dan diikuti oleh Disdukcapil 99,56% dan DLH 99,34%. Rata-rata Kota penyerapan anggaran di perangkat daerah hingga triwulan IV tahun 2023 ada di kisaran 97,14%

Untuk penyerap anggaran terendah adalah Dinas Sekretariat DPRD penyerapan anggaran sebesar 94,68% dari total anggaran sebesar Rp. 60.077.987.238,- .

Data Penterapan Anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 Per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	BPBD	3.584.587.590	3.569.431.271	99,58
2	Disdukcapil	8.046.276.788	8.011.085.541	99,56
3	DLH	31.202.253.952	30.995.077.965	99,34
4	Inspektorat	9.128.251.773	9.064.045.820	99,30
5	Dispusip	5.095.259.628	5.058.023.107	99,27
6	Kec. Cikole	12.511.893.818	12.407.281.276	99,16
7	DPUTR	103.557.095.235	102.632.300.139	99,11
8	Dispora	16.377.720.552	16.225.143.732	99,07
9	DKP3	13.200.725.822	13.075.680.239	99,05
10	KESBANG	21.565.376.428	21.360.004.605	99,05
11	Diskominfo	5.938.196.681	5.873.113.365	98,90
12	Kec. Warudoyong	10.914.648.303	10.792.170.135	98,88
13	Kec. Lembursitu	10.029.232.742	9.916.113.828	98,87
14	Kec. Citamiang	10.378.608.685	10.236.432.626	98,63
15	Kec. Cibereum	9.208.765.969	9.079.642.142	98,60
16	DPMPTSP	5.416.402.958	5.326.247.584	98,34
17	DISDIK	252.070.211.679	247.865.970.342	98,33
18	Kec. Baros	8.258.347.594	8.108.041.482	98,18
19	Dishub	17.991.411.166	17.608.699.473	97,87
20	Kec. Gunungpuyuh	9.785.452.579	9.572.300.674	97,82
21	DaldukKBP3A	12.845.006.760	12.542.393.333	97,64
22	BKPSDM	7.454.019.586	7.269.134.851	97,52
23	SETDA	57.236.235.624	55.650.358.900	97,23
	KOTA SUKABUMI	1.314.760.827.770	1.277.142.450.581	97,14
24	Dinsos	8.053.610.158	7.804.697.507	96,91
25	Diskumindag	18.131.684.655	17.569.650.822	96,90

26	BAPPEDA	16.090.782.425	15.585.026.804	96,86
27	BPKPD	57.244.122.977	54.977.295.050	96,04
28	PolPP & Damkar	12.007.840.038	11.516.923.465	95,91
29	DINKES	497.451.676.739	476.830.750.414	95,84
30	Disnaker	3.907.141.628	3.737.481.276	95,66
31	SETWAN	60.077.987.238	56.881.932.813	94,68

Sumber : Bappeda 2023

3.2.2 Capaian Kinerja Program per Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan per Urusan dikasifikasikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum konkuren baik wajib maupun urusan pilihan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan per urusan pemerintahan dijelaskan dalam table dibawah ini.

Tabel 7 Capaian Kinerja Program per Urusan Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	876.196.581.489,00	849.913.746.988,00	91,63	89,53	88,45	98,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	251.741.771.729,00	247.559.644.192,00	98,34	76,25	71,81	94,18
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251.741.771.729,00	247.559.644.192,00	98,34	76,25	71,81	94,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.416.931.179,00	167.969.358.637,00	97,99	100,00	97,99	97,99
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.238.550.750,00	79.504.035.755,00	99,08	100,00	99,10	99,10
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.889.800,00	59.889.800,00	60,01	15,00	0,15	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	26.400.000,00	26.360.000,00	99,85	90,00	90,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	497.451.676.739,00	476.830.750.414,00	95,85	100,00	98,57	98,57
Dinas Kesehatan	497.451.676.739,00	476.830.750.414,00	95,85	100,00	98,57	98,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.460.863.013,00	401.350.957.375,00	97,31	100,00	95,83	95,83
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.859.053.295,00	69.532.416.123,00	88,17	100,00	97,00	97,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.217.581.856,00	2.069.579.456,00	93,33	100,00	100,00	100,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	370.356.000,00	367.962.560,00	99,35	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.543.822.575,00	3.509.834.900,00	99,04	100,00	100,00	100,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	102.177.748.665,00	101.460.424.829,00	82,01	71,09	69,47	97,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.759.097.195,00	13.536.674.504,00	98,38	90,00	70,59	78,43
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.676.876.004,00	5.806.911.126,00	98,81	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.136.249.800,00	2.100.847.150,00	98,34	99,00	99,00	100,00
				100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.620.278.900,00	6.572.979.005,00	99,29	34,00	34,00	100,00
				74,00	74,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	7.437.390.150,00	7.279.844.046,00	97,88	47,00	47,00	100,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.663.206.500,00	4.591.054.013,00	98,45	20,00	20,00	100,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.404.772.000,00	3.381.031.050,00	99,30	86,22	86,22	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	58.132.387.100,00	57.861.123.915,00	99,53	82,85	82,85	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000,00	50.000.000,00	100	40,00	40,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	297.491.016,00	279.960.020,00	94,11	80,00	80,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.179.346.570,00	1.171.875.310,00	79,51	79,34	79,34	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	140.285.970,00	140.225.400,00	99,95	98,90	98,90	100,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	405.225.000,00	398.478.500,00	98,34	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	545.035.600,00	545.015.600,00	100,00	98,90	98,90	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	88.800.000,00	88.155.810,00	99,27	98,90	98,90	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12.007.840.038,00	11.516.923.465,00	91,61	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.297.783.088,00	10.188.789.465,00	98,94	100,00	100,00	100,00
PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.599.407.500,00	1.217.773.000,00	76,14	100,00	100,00	100,00
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	110.649.450,00	110.361.000,00	99,74	100,00	100,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.584.587.590,00	3.569.431.271,00	99,23	100,00	99,96	99,96

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.214.785.040,00	3.204.066.071,00	99,67	100,00	99,92	99,92
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	369.802.550,00	365.365.200,00	98,80	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Dinas Sosial	8.053.610.158,00	7.804.697.507,00	94,84	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.572.572.448,00	4.489.351.930,00	98,18	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.283.577.200,00	2.238.227.200,00	98,01	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	802.756.550,00	715.936.617,00	89,18	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	284.743.900,00	264.871.700,00	93,02	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	93.845.060,00	80.195.060,00	85,45	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.615.000,00	14.615.000,00	100	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.132.119.714,00	126.208.888.473,00				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Dinas Tenaga Kerja	3.881.256.980,00	3.712.725.276,00	91,24	83,75	83,75	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.354.407.080,00	3.327.947.876,00	99,21	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	429.700.000,00	288.490.000,00	67,14	80,00	80,00	100,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	28.000.000,00	27.937.500,00	99,78	80,00	80,00	100,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	69.149.900,00	68.349.900,00	98,84	75,00	75,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.843.982.235,00	7.583.539.916,00	90,13	87,14	87,14	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.292.954.375,00	6.214.185.894,00	98,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	169.269.700,00	165.210.222,00	97,60	40,00	40,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	524.883.860,00	521.171.500,00	99,29	85,00	85,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000,00	25.000.000,00	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	244.265.100,00	193.521.100,00	79,23	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.740.000,00	52.715.000,00	76,68	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	518.869.200,00	411.736.200,00	79,35	85,00	85,00	100,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	9.955.589.544,00	9.857.468.453,00	99,78	67,80	69,63	102,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.574.050.094,00	9.476.180.503,00	98,98	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	17.760.100,00	17.760.100,00	100	10,00	10,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	341.834.950,00	341.583.450,00	99,93	40,00	49,13	122,83
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.195.000,00	15.195.000,00	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400,00	6.749.400,00	100	89,00	89,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Dinas Lingkungan Hidup	31.202.248.952,00	30.995.077.965,00	112,16	78,13	75,00	96,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.440.868.602,00	25.273.323.588,00	99,34	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	167.286.250,00	167.286.250,00	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	167.587.300,00	167.471.117,00	99,93	48,50	48,50	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	435.477.500,00	430.558.300,00	98,87	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8.745.000,00	8.745.000	99,94	12,00	12,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.167.050,00	64.167.050,00	100	100,00	75,00	75,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	22.874.850,00	22.874.850,00	100	14,00	14,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	82.429.800,00	82.379.800,00	99,94	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.812.812.600,00	4.778.272.010,00	99,28	50,50	50,50	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.046.276.788,00	8.011.085.541,00	99,87	100,00	97,50	97,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA	7.556.618.038,00	7.521.636.291,00	99,54	100,00	87,50	87,50
II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	405.543.150,00	405.371.150,00	99,96	100,00	100,00	100,00
III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	44.490.600,00	44.490.600,00	100	100,00	100,00	100,00

IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	30.250.000,00	30.212.500,00	99,88	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.375.000,00	9.375.000,00	100	100,00	100,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5.001.024.525,00	4.944.976.728,00	98,96	76,18	72,94	95,75
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA						
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA						
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	287.452.000,00	284.652.000,00	99,03	85,00	71,65	84,29
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.149.066.150,00	2.139.725.150,00	99,57	76,00	76,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.564.506.375,00	2.520.599.578,00	98,28790455	67,53	71,17	105,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Dinas Perhubungan	17.991.411.166,00	17.608.699.473,00	97,77	90,50	89,74	99,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.205.295.966,00	14.889.042.539,00	97,92	100,00	98,47	98,47
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.786.115.200,00	2.719.656.934,00	97,61	81,00	81,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.799.575.831,00	5.735.322.515,00	97,66	88,33	91,11	103,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.251.742.881,00	5.195.315.413,00	98,93	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	434.593.250,00	433.117.402,00	99,66	90,00	90,00	100,00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	113.239.700,00	106.889.700,00	94,39	75,00	83,33	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	12.657.412.755,00	12.297.276.922,00	98,78	167,02	159,16	95,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.317.941.225,00	8.073.987.142,00	97,07	100,00	99,17	99,17
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.229.050,00	1.229.050	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	6.851.100,00	6.801.100,00	99,27	100,00	50,00	50,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	531.236.000,00	531.235.100,00	100	64,00	64,74	101,16
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81.400.000,00	80.100.000,00	98,4	19,00	14,05	73,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.718.755.380,00	3.603.924.530,00	96,91	86,15	86,15	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	464.500.000,00	463.500.000,00	99,78	700,00	700,00	100,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	5.416.402.958,00	5.326.247.584,00	98,13	100,00	95,40	95,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.232.485.573,00	4.163.793.516,00	98,38	100,00	97,63	97,63
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	657.909.885,00	649.100.168,00	98,66	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	72.664.600,00	71.164.600,00	97,94	100,00	83,33	83,33
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	89.192.900,00	85.539.300,00	95,90	100,00	91,42	91,42
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000,00	347.200.000,00	97,89	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.450.000,00	9.450.000,00	100	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.774.617.552,00	14.634.327.993,00	98,95	100,00	98,95	98,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.177.539.052,00	6.058.102.206,00	98,07	100,00	99,85	99,85
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	906.225.000,00	896.627.072,00	98,94	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.690.853.500,00	7.679.598.715,00	99,85	100,00	97,00	97,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
Dinas Komunikasi dan Informatika	29.658.000,00	29.658.000,00	100,00	60,00	68,75	114,58
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29.658.000,00	29.658.000,00	100	60,00	68,75	114,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	108.962.850	108.132.850	99	60,00	60,00	100,00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	108.962.850,00	108.132.850,00	99,24	60,00	60,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	328.439.950,00	306.326.150,00	95,62	89,50	88,28	98,64
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	57.549.450,00	57.509.450,00	99,93	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	140.358.700,00	120.358.700,00	85,75	100,00	95,14	95,14
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	65.531.800,00	65.500.000,00	99,95	78,00	78,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65.000.000,00	62.958.000,00	96,85	80,00	80,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.954.557.878,00	4.925.321.457,00	99,57	66,00	66,00	100,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.567.991.898,00	4.539.668.085,00	99,38	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	386.565.980,00	385.653.372,00	99,76	32,00	32,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	140.701.750,00	132.701.650,00	94,31	64,00	64,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	140.701.750,00	132.701.650,00	94,31	64,00	64,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9.917.830.978,00	9.683.102.371,00	97,91	80,87	76,20	93,72
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	641.189.350,00	638.915.150,00	99,79	33,57	28,39	84,57
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	570.764.650,00	568.505.150,00	99,60	24,83	25,67	103,38
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	70.424.700,00	70.410.000,00	99,98	42,31	31,11	73,53
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.603.103.000,00	1.596.295.385,00	99,76	96,25	96,25	100,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	714.320.000,00	707.597.401,00	99,06	85,00	85,00	100,00
Program Pemasaran Pariwisata	116.835.500,00	116.835.500,00	100	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	66.947.500,00	66.942.500,00	99,99	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	705.000.000,00	704.919.984,00	99,99	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.627.667.228,00	2.603.016.936,00	99,45	65,40	66,52	101,71
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.346.347.750,00	1.330.788.448,00	98,84	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	804.769.913,00	797.983.008,00	99,16	40,00	45,60	114,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	307.584.965,00	305.280.880,00	99,25	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.629.750,00	8.629.750,00	100	80,00	80,00	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160.334.850,00	160.334.850,00	100	7,00	7,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.575.518.300,00	2.510.500.300,00	90,66	100,00	76,05	76,05
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.474.330.050,00	2.414.277.350,00	97,57	100,00	64,98	64,98
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.263.750,00	3.652.750,00	85,67	100,00	58,33	58,33
PROGRAM PENGEMBANGAN	10.800.000,00	8.879.000,00	82,21	100,00	100,00	100,00

EKSPOR						
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	86.124.500,00	83.691.200,00	97,17	100,00	80,89	80,89
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.434.253.600,00	2.298.373.600,00	98,05	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.327.795.000,00	2.191.915.000,00	94,16	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	48.432.000,00	48.432.000,00	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	58.026.600,00	58.026.600,00	100	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
Dinas Tenaga Kerja	36.099.500	36.001.000	100	90	90	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	36.099.500	36.001.000	99,73	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	117.314.222.862	112.532.291.713				
Sekretariat Daerah	57.236.235.624	55.650.358.900	97,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.059.735.044	38.234.099.544	97,89	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.550.408.940	16.806.725.734	95,76	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	626.091.640	609.533.622	97,36	100,00	100,00	100,00
Sekretariat DPRD	60.077.987.238	56.881.932.813	95,98	100,00	97,15	97,15
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.523.811.588	39.483.226.037	92,85	100,00	100,00	100,00
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	17.554.175.650	17.398.706.776	99,11	100,00	94,29	94,29
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	80.788.924.988	77.831.456.705				
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.881.084.025	14.382.277.124	97,95	93,33	93,33	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.203.794.925	9.747.527.470	95,53	80,00	80,00	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.950.711.950	1.943.239.849	99,62	100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.726.577.150	2.691.509.805	98,71	100,00	100,00	100,00
KEUANGAN	57.244.122.977	54.977.295.050	95	100	98	98
Badan Pengelolaan Keuangan			94,83	100,00	97,50	97,50

dan Pendapatan Daerah	57.244.122.977	54.977.295.050				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.118.097.918	40.184.558.203	95,41	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.788.136.709	9.713.704.225	99,24	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.498.968.850	1.287.788.703	85,91	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.838.919.500	3.791.243.919	98,76	100,00	100,00	100,00
KEPEGAWAIAN	7.454.019.586	7.269.134.851	96	100	93	93
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.454.019.586	7.269.134.851	95,95	100,00	92,91	92,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.922.989.736	5.805.149.376	98,01	100,00	98,72	98,72
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	575.027.150	529.551.080	92,09	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	956.002.700	934.434.395	97,74	90,00	90,00	100,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.209.698.400	1.202.749.680	99	33	33	100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.209.698.400	1.202.749.680	99,43	32,50	32,50	100,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.209.698.400	1.202.749.680	99,43	32,50	32,50	100,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.128.251.773	8.289.727.698	50	47	44	95
INSPEKTORAT DAERAH						
Inspektorat Daerah	9.128.251.773	8.289.727.698	49,81	46,67	44,33	95,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.726.902.918	7.667.330.537	99,23	70,00	70,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	648.462.500	256.220.165	99,93	70,00	60,00	85,71
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	752.886.355	366.176.996	99,67	3	3,00	100,00
UNSUR KEWILAYAHAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99	96	96	100
KECAMATAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99	96	96	100
Kecamatan Cikole	12.511.893.818	12.407.281.276	99,61	100,00	99,70	99,70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.255.815.868	8.160.176.400	98,84	100,00	98,81	98,81
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1.884.580.500	1.884.477.643	99,99	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.300.333.850	2.291.463.633	99,61	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.163.600	71.163.600	100,00	100,00	100,00	100,00
Kecamatan Gunung Puyuh	9.785.452.579	9.572.300.674	99,18	100,00	99,71	99,71

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.674.128.229	6.467.502.257	96,90	100,00	99,74	99,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.453.042.100	1.452.969.100	99,99	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.576.048.250	1.570.016.517	99,62	100,00	99,42	99,42
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.844.000	66.422.800	99,37	100,00	99,37	99,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.390.000	15.390.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kecamatan Citamiang	10.378.608.685	10.236.432.626	99,49	100,00	99,42	99,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.470.494.635	7.332.644.461	98,15	100,00	97,11	97,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.226.365.950	1.226.102.447	99,98	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.625.799.900	1.621.769.120	99,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.718.200	54.691.598	99,95	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.230.000	1.225.000	99,59	100,00	100,00	100,00
Kecamatan Warudoyong	10.914.648.303	10.792.170.135	99,13	75,00	75,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.306.781.653	7.202.982.066	98,58	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.608.654.950	1.606.260.648	99,85	85,00	85,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.894.926.500	1.879.614.223	99,19	40,00	40,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.597.200	48.625.198	98,04	60,00	60,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.688.000	54.688.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kecamatan Baros	8.258.347.594	8.108.041.482	98,37	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.770.659.844	5.631.238.790	97,58	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.177.172.350	1.175.974.900	99,90	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.251.454.550	1.243.845.712	99,39	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.559.050	39.483.230	95,01	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.501.800	17.498.850	99,98	100,00	100,00	100,00
Kecamatan Lembur Situ			99,20	100,00	99,93	99,93

	10.029.232.742	9.916.113.828				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.864.193.060	6.758.893.156	98,47	100,00	99,64	99,64
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.688.750	1.459.648.850	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.643.329.332	1.636.340.885	99,57	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM	47.921.600	47.210.937	98,52	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.100.000	14.020.000	99,43	100,00	100,00	100,00
Kecamatan Cibeureum	9.208.765.969	9.077.855.804	98,47	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.581.848.994	6.457.336.335	98,11	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.812.500	31.812.500	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.184.889.275	1.184.863.950	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.365.703.200	1.361.763.613	99,71	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.512.000	42.079.406	94,53	100,00	100,00	100,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.705.161.706	3.631.965.433	98,02	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	919.206.183	884.195.633	96,19	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	859.104.039	857.189.039	99,78	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	746.829.100	681.829.100	91,30	100,00	89,74	89,74
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	351.800.000	351.800.000	100,00	100,00	74,90	74,90
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.983.275.400	14.953.025.400	99,80	100,00	45,56	45,56

Sumber: Bappeda, 2023

3.3 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Dengan mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan rencana pembangunan daerah karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan nasional dan provinsi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan dan fenomena pandemi covid 19, maka diidentifikasi isu strategis daerah yang kemudian menjadi prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah tersebut dilaksanakan melalui program unggulan yang meliputi:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia atau SDM yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia;
 - a) Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;
 - b) Program Peningkatan Literasi;
 - c) Uduan Online di dukung oleh Forum Silih Asih Silih Asuh;
 - d) Program Students Camp;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Implementasi Reformasi Birokrasi yang Inovatif Berbasis Teknologi Informasi;
 - a) Program Sukabumi Participatory Responder atau SUPER,
3. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar untuk Kesejahteraan Masyarakat;
 - a) Program Optimalisasi Puskesmas;
 - b) Program Rumah Singgah;
 - c) Kelurahan Sport Center
4. Peningkatan Dukungan Infrastruktur untuk Pembangunan;
 - a) Program Revitalisasi Pedestrian;
5. Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan;
 - a) Program Sukabumi KECE;
 - b) Program Kredit Anyelir;
 - c) Program Little Sukabumi;
 - d) Program Sukabumi Creative Hub;
 - e) Program Pendidikan Vokasi;
 - f) Program Sukabumi Artist Association;

Program pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Selain program pembangunan Daerah, terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi antara daerah, provinsi dan nasional dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan.

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pemerintah Kota Sukabumi pada tahun 2023 mampu meraih banyak prestasi dalam berbagai bidang. Termasuk dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kinerja pemerintah (LAKIP) yang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu mendapatkan nilai “BB”. Ini merupakan suatu penghargaan atas keseriusan perangkat daerah dalam menerjemahkan visi misi kepala daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatannya. Hal ini tentu saja dapat menjadi pendorong/motivasi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk terus bekerja dan melayani masyarakat dengan baik.

Adapun beberapa penghargaan dan prestasi Kota Sukabumi yang mampu diraih pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tingkat Nasional:

NO	PRESTASI/PENGHARGAAN	TAHUN
	RSUD Syamsudin Kota Sukabumi	
1	PKRS AWARD	2022
	Kelurahan Cikundul	
2	Juara I 10 program PKK	2022
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB P2A	
3	KOTA LAYAK ANAK TK. MADYA	2022
4	MANGGALA KARYA KENCANA UNTUK WALI KOTA DAN KETUA TIM PENGGEAK PKK	2022
5	PIAGAM APRESIASI CAPAIAN 100% UNTUK PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA	2022
	BKPSDM	
6	Penghargaan Badan Kepegawaian Negara 5 Besar Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik	2022
7	Penghargaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Predikat Baik atas keberhasilan menerapkan sistem Merit dalam Manajemen ASN	2022
	DKP 3	
8	Penghargaan Jasa di Bidang Pertanian Pada Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 (Titin Kartini)	2022
	Diskumindag	
9	Sertifikat Kesesuaian PT IGS Kepada Pasar Lembursitu (Sebagai Pasar Rakyat yang bersertifikat SNI)	2022
	DISPUSIPDA	
10	Perpustakaan terbaik untuk Perpustakaan Kelurahan Cisarua	2022
11	Terbaik ke III Perpustakaan Umum Kota Sukabumi dalam Kajian IPLM	2022
	SDN Situ Gede	
12	Festival di Kejuruan Nasional Karate Sotokan Kandaga Indonesia SHOKAIDO	2022
	DPMPTSP	
13	Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (Kemenpan RB)	2022
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14	(SDN Cipanengah CBM) Juara 1 Clat Open Pencak Silat National	2022
15	(SDN Cipanengah CBM) Juara 1 BNN Cup 3 antar Pelajar Se-Indonesia	2022
16	(SMPN 12 SUKABUMI) Juara II SELEKSI DUTA TEKNOLOGI KEMENDIKBUDRISTEK 2022 / PEMBATIK	2022
17	(SMPN 13 KOTA SUKABUMI) Juara I Prominensia (PRESTIGE - Olimpiade Sains Pemuda Indonesia)	2022
18	Juara I National Science & Social Competition 3.0	2022

19	Juara I Kejuaraan Nasional Karate Sotokan Kandaga Indonesia Shokaido 2022 Piala Ketua MPR RI	2022
20	(SMP IT Hayatan Thayyibah) Juara Harapan I Penulis Terpilih Guru dalam Lomba Cipta Cerpen Nasional (LCCN)	2022
21	(SMP IT Hayatan Thayyibah) Juara Harapan III Penulis Terpilih Siswa Lomba Cipta Puisi Nasional (LCPN)	2022
22	(SMP IT Hayatan Thayyibah) Juara Harapan III Penulis Terpilih siswa Lomba Cipta Puisi Nasional (LCPN)	2022
23	(SMP Negeri 10) Juara I ORC Guru 2022 Olimpiade Rihand Creative	2022
24	(SMP Negeri 10) Juara Harapan I ORC Guru 2022 Olimpiade Rihand Creative	2022
25	(SMPN 12 SUKABUMI) Juara II OLIMPIADE RIHAND CREATIVE GURU 2022	2022
26	(SMP IT Hayatan Thayyibah) Juara III Physic Festival 8.0 3D Wall Magazine Tingkat Nasional 2022	2022
27	Penetapan Mochi sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2022	2022
28	Penetapan Tarian Rakyat Uyeg sebagai WBTb Indonesia sudah diusulkan dan ditetapkan pada tahun 2018 mendapatkan sertifikat pada tahun 2022	2022
29	Penghargaan atas partisipasi Anugrah Karya Budaya dan Maestro di Kemendikbudristek dengan penyajian Mochi sebagai karya budaya keterampilan dan kerajinan tradisional	2022
30	Penghargaan Juara Pertama Gita Bahana Nusantara yang diutus ke tingkat Nasional	2022
31	(SMP N 13) penghargaan Penulis Nasional dalam Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional yang diselenggarakan oleh Nyalanesia	2022
32	(SMP N 13 Nadhifa Chaerun Nisa) Juara 1 SMP KATA Putri pada kejuaraan karate nasional pakuan karate championsip	2022
33	(SMP N 13 Syeful Abdur Rahman) Juara 2 pada Kompetisi Sains Indonesia	2022
34	(SMP N 13 Syeful Abdur Rahman) Medali Emas pada Kompetisi Hebat Sains Nasional	2022
35	(SMP N 13 Syeful Abdur Rahman) Medali Emas Indonesia Science Competition	2022
36	(SMP N 13 Syeful Abdur Rahman) Medali Emas pada Olimpiade Sains Nasional bertajuk Prominensia	2022
37	(SMP N 13 Syeful Abdur Rahman) Medali Emas pada National Science & Social Competition 3.0	2022
38	(SMP N 13 Syeful Abdur Rahman) Penulis Nasional pada Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional	2022
39	SMPN 13 Syeful Abdur Rahman) Medali Perak pada Olimpiade Sains Biologi & IPA	2022
40	(SMP N 13 Darin Putri Indarsyah) Juara II Tingkat Nasional Kata Perorangan Putri Pra Pemuda Festival Kejuaraan Nasional Shokaido 2022 Piala Ketua MPR RI	2022
41	(SMP N 13 Paskibra) Harapan Purwa 1 pada LKBB Laskar Panji Hitam	2022
42	(SMP N 13) Juara II Tingkat Nasional Kata Perorangan Putri Festival Kejuaraan Nasional Shokaido 2022 Piala Ketua MPR RI	2022
43	Juara 2 Standar Sprint 500 M ,,Juara 3 Standar Circuit 200 M Sepatu roda	2022
44	Juara Harapan 3 Lomba Membaca Puisi	2022
45	Juara Harapan 2 Lomba Tahfidz Qur'an	2022
46	Juara 2 Standar Sprint 500 M Sepatu roda Jakarta Open 2022	2022
47	II MHQ DAN LCC PAI GEBYAR MUHARRAM 1444 H / 2022 M	2022
48	Juara harapan 1 Tahfidz Qur'an	2022
49	Moci Sukabumi sebagai Waridsan Budaya Takbenda Indonesia	2022
	Kelurahan Cisarua	
50	Juara Terbaik Perpustakaan Desa/Kel	2022
	Dinas Kesehatan	
51	Kab/Kota mencapai kedua target NPAFP Rate dan Discarded (Bukan Campak-Bukan Rubela) Rate :	2022
52	Puskesmas Sukabumi sebagai Unit Kerja dengan predikat menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	2022
53	Kabupaten dengan Pelaporan Kompetensi Germas Terbaik	2022
	Inspektorat Daerah	
54	Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 Kota Sukabumi	2022
55	Unit Kerja Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Puskesmas Sukabumi	2022
56	Penghargaan Atas Akuntabilitas Kinerja Dengan Predikat Nilai "BB" Dari Kemenpan dan RB	2022
	BPKPD	
57	Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2022

58	Peringkat Ke-II Pemerintah Daerah dengan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2021	2022
59	Penghargaan atas capaian Opini WTP minimal 5x berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 sd 2021	2022
	Disdukcapil	
60	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022	2022
	Sekretariat Daerah	
61	Juara 2 Tk Provinsi dan Juara 4 Tk Nasional pengelolaan JDIIH	2022
62	Penganugrahan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan public oleh ombudsman RI dengan predikat zona hijau	2022
63	Predikat BB hasil evaluasi reformasi birokrasi	2022
	Diskominfo	
64	TOP LEADER ON DIGITAL IMPLEMENTATION ATAS NAMA WALIKOTA SUKABUMI	2022
65	TOP DIGITAL IMPLEMENTATION LEVEL BINTANG 4	2022
	Dispora	
66	Peringkat ke 2 Pekan Spesialis Olympics Indonesia (PESONAS) Meraih 1 Perak (Sepakbola Putri) dan 1 Perunggu (Sepakbola Putra)	2022
67	Festival Olahraga Rekreasi Tk. Nasional. (FORNAS) meraih 1 medali Emas (Cabor Bereggu Osteo Dance, 1 Medali Perunggu (Cabor Inorga)	2022
68	Kejurnas Renang Swimming Open KU. 2009 / 2010 meraih 3 medali Emas dan 2 medali Perak	2022
69	POSPENAS XI Meraih 1 Medali Emas Cabor Silat	2022
70	Kejurnas Sepatu Roda Piala Ibu Negara 2022 1 Medali Emas dan 1 Medali Perak	2022
71	Pekan Olahraga Mahasiswa Tk, Nasional meraih 2 medali perunggu cabor Petaque	2022
	Lain Lain	
72	Green leadership nirwasita tantra 2022 untuk wali kota dari kementerian klhk dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota sukabumi sebagai peringkat pertama institusi pendukung dalam perencanaan pembangunan berbasis lingkungan kategori kota sedang	2022
73	Creative leader ekosistem industri kreatif dari indonesia creative cities network (iccn) 2022	2022
74	Sdn suryakencana cbm meraih penghargaan terbaik ke - 3 sentra panjang jajanan / kantin kategori institusi pendidikan sekolah dasar oleh kementerian kesehatan	2022
75	Penghargaan dari bpom atas komitmen dalam melaksanakan program keamanan sekolah dengan pjas aman tahun 2022	2022
	Lain Lain	
76	Peringkat 12 Kota dalam rangka Pencapaian SDGs Award Tahun 2022	2022
	Bappeda	
77	Predikat kota terinovatif <i>innovative government award</i> (iga) tahun 2022.	2022
78	Inovasi smart economy terbaik kategori kota dalam kegiatan indonesia smart nation award 2022	2022
	Tambahan dari Ortala	
79	Sebagai Best Practice Audit Stunting Nasional Dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn);	2022
80	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik), Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Memperoleh Nilai 79,54 (Zona Hijau) Dengan Opini Kualitas Tinggi Dari Ombudsman Republik Indonesia;	2022

Tingkat Propinsi :

NO	PRESTASI/PENGHARGAAN	TAHUN
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	Instansi Dengan Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2022 Kategori Paripurna 100%	2022
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB P2A	
2	P2WKSS JUARA HARAPAN 3	2022
3	TERBAIK KE 3 CAPAIAN MKJP TERBAIK	2022
4	TERBAIK KE 2 CAPAIAN MOP TERBAIK	2022

	BKPSDM	
5	Penghargaan Peringkat III Kategori Ketaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN bernilai sangat baik	2022
	Kel Jayamekar	
6	Piagam Penghargaan BPOM dalam melaksanakan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan	2022
	Kel Cipanengah	
7	Juara 2 Posyandu Tingkat Provinsi Tahun 2022	2022
	DKP 3	
8	Public Services of The Year Jabar 2022 dalam ajang Indonesia Markplus Festival di Bandung melalui inovasi STRATEGI ONE ROOF (ONE REGION ONE OFFTAKER)	2022
9	Top 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2022 melalui inovasi STRATEGI ONE ROOF (ONE REGION ONE OFFTAKER)	2022
10	Peringkat II Lomba Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Berprestasi Kategori Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Iis Rismawati)	2022
	Diskumindag	
11	Piagam Penghargaan Pasar Rakyat Berprestasi (Pasar Lembursitu)	2022
12	Juara 3 lomba paparan program dan unggulan Dekranasda se Jabar , mewakili wilayah 5	2022
13	UMKM Kategori Fashion UMKM Jabar	2022
14	Koordinator Pendamping Daerah Terbaik (UMKM Jabar)	2022
15	Pendamping UMKM Terbaik (UMKM Jabar)	2022
	DISPUSIPDA	
16	Perpustakaan Kelurahan Karamat Sebagai Perpustakaan Kelurahan Terbaik Kedua	2022
17	Juara I Duta Baca an. LISAN	2022
18	Juara II Lomba Pustakawan Wilayah Perpustakaan Kelurahan Karamat	2022
19	Juara II Lomba Perpustakaan Sekolah MA. Syamsul Umum Kota Sukabumi	2022
20	Terbaik ke IV Penilaian LAKE DISPUSIPDA	2022
21	Juaran I Lomba vidio dongeng SMP N. Kota Sukabumi	2022
22	Juara III GLN Gareulis SMP.N IV Kota Sukabumi	2022
23	Juara I Gerakan Literasi Masyarakat TBM Ma'murina Kota Sukabumi	2022
24	Akreditasi A Perpustakaan MA Syamsul umum Kota Sukabumi	2022
25	Akreditasi A Perpustakaan SMA.N.I Kota Sukabumi	2022
26	Tokoh Terinspirasi dan Literat ibu Safitri Guru SMP.N 13 Kota Sukabumi	2022
	Dinas Sosial	
27	Indonesia Markplus Festival Dinas Sosial Kota Sukabumi Public Service Of The Year JABAR 2022 (Udunan Online)	2022
	DPMPPTSP	
28	Public Service Of The Year Jabar (Mark Plus) DPMPPTSP	2022
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
29	(SDN Cipanengah CBM) Juara II Pencak Silat D2AM Pesilat Championship Tingkat Jawa Barat	2022
30	(SDN BABAKAN BANDUNG) Juara Harapan III Kaligrafi Kontemporer	2022
31	(SDN DEWI SARTIKA CBM) Juara Harapan II PANTOMIM	2022
32	(SDN DEWI SARTIKA CBM) Juara Harapan III PANTOMIM	2022
33	(SMP Negeri 10 Kota Sukabumi) Juara II Festival Marawis Se-Provinsi Jawa Barat & DKI Batch V Tingkat Pelajar Gebyar Milad Ke-39 Pondok Pesantren Nurul Huda Yaspin	2022
34	(SMP Negeri 10 Kota Sukabumi) Juara Harapan II Duta Rumah Belajar	2022
35	(SDN DEWI SARTIKA CBM) Juara III ATLETIK	2022
36	(SDN Sriwidari) Juara III Kriya Anyam	2022
37	(SMP Negeri 3) Juara II Karate	2022

38	(SMP Islam Terpadu Hayatan Thayyibah) Juara III Kejuaraan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
39	(SMPN 1) Juara III LOMBA Ngadongeng TINGKAT SMP	2022
40	(SMPN 1) Juara I KEJUARAAN CABANG OLAHRAGA RENANG DBON	2022
41	Penghargaan atas daerah yang berpartisipasi dalam Riksa Budaya Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
42	Penghargaan atas partisipasi Merak Sadunya	2022
43	Juara 1 MTQ Putera Pekan Keterampilan dan Seni Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
44	Juara 2 Ngadodor Sorangan Putra Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
45	Juara 3 Maca Sajak Putra Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
46	Juara 3 Ngadongeng Putri Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
47	Juara 3 Pencak Silat Jurus Tunggal Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
48	Juara 3 Kata Perseorangan Putra Olimpiade Olahraga Sains Nasional Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
49	Juara 3 Bidang Matematika Olimpiade Sains Nasional Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
50	Penyaji Terbaik 3 Festival Kreativitas Tari FLS2N Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
51	Sekolah Lulus Topik Pembelajaran Pada Platform Merdeka Belajar	2022
52	Guru Lulus Topik Pembelajaran Pada Platform Merdeka Belajar	2022
53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi mendapat penghargaan Atas Komitmen, Dukungan dan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak / Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri / Perencanaan Berbasis Data	2022
54	karya tulis ilmiah "idris., S.Pd" Guru SDN Pakujajar Cipta Bina Mandiri (CBM) Sukabumi, Idris, mendapat apresiasi dan penghargaan dari Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat (Jabar). karya tulis ilmiah terpuji guru penggerak dalam program Filtrasi (Festival Literasi) Guru Penggerak tingkat Jabar yang diselenggarakan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)	2022
55	Open Turnamen Karate se-Jawa Barat Piala Danpusdikarmed #1 Tahun 2022	2022
56	(SMPN 13) lomba SMKS PGRI Kota Sukabumi	2022
57	JUARA II Taekwondo event Wali Kota Bandung Open	2022
58	(Invitasi Renang Fun Swim) Juara 1 Lomba Renang	2022
59	(Invitasi Renang Fun Swim) Juara 2 Lomba Renang	2022
60	(Invitasi Renang Fun Swim) Juara 3 Lomba Renang	2022
61	(SMPN 10 JUARA) III CHAMPION STUDENT ATHLETICS CHAMPIONSHIPS INDONESIA	2022
62	(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) kota teresponsif dalam menjalin kemitraan dengan BBGP provinsi jawa barat	2022
63	(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sekolah lulus topik pembelajaran pada platform merdeka belajar	2022
64	(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Guru lulus topik pembelajaran pada platform merdeka belajar	2022
65	(SDN BAROS KENCANA CBM) Penampilan terbaik Pencak Silat	2022
	Kelurahan Cisarua	
66	Dua Belas Besar Desa cantik	2022
	Dinas Kesehatan	
67	Kota Non Prioritas dengan Capaian Indikator PPM Terbaik di Provinsi Jawa Barat	2022
68	TOP 10 KIJB Kriteria Inovator untuk Inovasi Puskesmas Pabuaran (LASEGAR)	2022
69	INSTALASI FARMASI TERSTANDAR	2022
70	Pemenang Poyandu Award	2022

	BPKPD	
71	Terbaik Ke Tiga Pemerintah Daerah Di Jawa Barat Dalam Kinerja Pengelola DAK Fisik Tahun 2021	2022
	Dishub	
72	Juara 3 Lomba Smart Student Patroli Keamanan Sekolah Tingkat Polda Jawa Barat	2022
73	Juara 1 Voli HARHUBNAS 2022	2022
74	Paduan Suara Terfavorit HARHUBNAS 2022	2022
	Disdukcapil	
75	Public Service Of The Year Jawa Barat 2022	2022
76	Atas Capaian Target Kinerja dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Predikat Terbaik I pada Kategori Penduduk Kecil Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	2022
	Sekretariat Daerah	
77	Juara 2 Tk Provinsi dan Juara 4 Tk Nasional pengelolaan JDIIH	2022
	Diskominfo	
78	BEST PROGRESSIVE TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA DI JAWA BARAT	2022
	Dispora	
79	Juara I Bidang Inovasi & Teknologi Tepat Guna Terbaik II Tingkat Jawa Barat (Pemuda Pelopor)	2022
80	Terbaik ke II Bidang Agama Sosial dan Budaya Tk Prov. Jabar (Pe muda Pelopor)	2022
81	Festival Olahraga Rekreasi Provinsi Jawa Barat IV (FORPROV) meraih 3 medali Emas (Cabor Beregu Osteo Dance, Inorga dan Inorga Yoga), 6 Perak (Cabor Senam Putra, Silat Putri, Inorga Yoga dan Inorga KIS) 12 Medali Perunggu (Cabor Senam Putra, Inorga, Inorga Yoga, Inorga Fortina, Inorga Adyti) Peringkat ke 10	2022
82	Festival Olahraga Pelajar (FOP) Tk. Jawa Barat meraih 2 Medali Emas (Cabor Atletik dan Pencak Silat), 3 Medali Perunggu (Cabor Atletik dan Pencak Silat)	2022
83	Peringkat ke 24 PORPROV XIV Jawa Barat, Perolehan Medali 6 Emas (Cabor : 1 Barongsai, 3 Kempo, 1 Anggar, 1 Senam Artistik), 11 Perak (Cabor : 1 Muaythai, 1 Selam Laut, 2 Barongsai, 2 Dansa, 1 Petanque, 2 Catur, 1 Hockey Outdoor, 1 Judo) , 29 Perunggu (Cabor : 1 Dansa, 1 Menembak, 1 Muaythai, 1 Atletik, 2 Gulat, 3 Anggar, 1 Senam Artistik, 3 Sambo, 1 Bulutangkis, 1 Sepatu Roda, 1 Billiar, 1 Baseball, 1 Bola Tangan Pasir, 3 Kurash, 1 Selam Kolam, 4 Judo, 1 Karate, 2 Hockey Outdoor)	2022
84	Peringkat ke 22 PEPARDA VI Jawa Barat, Perolehan Medali 3 Emas (Cabor Renang), 2 Perak (Cabor Blind Judo), 5 Perunggu (Cabor: 4 Blind Judo, 1 Tenis Meja)	2022
85	Kejurda DBON Meraih 1 Medali Emas cabor Renang	2022
	Lain Lain	
86	Anugrah posyandu award jawa barat tahun 2022	2022
87	Baznas award jawa barat sebagai kategori growth dana hibah tertinggi dari kategori kepala daerah peduli baznas	2022
88	Penghargaan sekolah lulus topik pembelajaran pada platform merdeka mengajar, balai besar penjaminan mutu pendidikan (bbpmp) provinsi jawa barat	2022
89	Kota non prioritas capaian indikator ppm terbaik provinsi jawa barat	2022
90	Penghargaan atas penilaian audit kearsipan tingkat jawa barat	2022
91	Porprov xiv jawa barat 2022 drngan perolehan medali 3 emas, 2 perak, 2 perunggu	2022
92	Juara 2 lombok tk. Propinsi perpustakaan kel. Karamat .	2022
93	Juara 1 lomba video dongeng tk. Jawa barat smp n 1 kota sukabumi	2022
	Bappeda	
94	Terbaik ii penghargaan pembangunan daerah (ppd) tingkat provinsi jawa barat (perencanaan dan pencapaian pembangunan)	2022
95	Inovasi pendanaan pembangunan melalui bantuan keuangan kompetitif provinsi jawa barat untuk tahun 2023 dengan program pembangunan enokomi sukabumi go digital dan one roof one oftaker	2022
96	Top 2 terbaik (inovasi lasegar pkm pabuaran) kopetensi inovasi jawa barat (kijb) tahun 2022	2022
97	Kota terbaik ke-1 dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam ajang PPKM Award Tahun 2023	2023
98	Penghargaan Sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;	2023

99	Piagam Penghargaan Untuk Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Sukabumi Dalam Kepesertaan Program Jkn Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Karena Jumlah Peserta Jkn Di Kota Sukabumi Sudah Mencapai 96% Dari Jumlah Penduduk Kota Sukabumi	
100	Kota Sukabumi sebagai Kota Toleran 10 besar (Peringkat 6) dari 94 Kota se Indonesia	
101	Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Kota dengan Realisasi Anggaran Preingkat Ketiga Terbaik (APBD AWARD 2023)	
	(SMPN 12 Sukabumi) juara II Program PembaTIK (Pemilihan Duta Teknologi Kemendikbudristek)	
	(SDN Cikole) Juara II Piala Mentri Pemuda dan Olahraga	
	Penghargaan dari Kemendikbudristek untuk Kota Sukabumi yang berkomitmen dalam evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ke dalam dokumen perencanaan daerah penghargaan akan disampaikan di pertengahan bulan Maret 2023	
	Juara 1 kumite putri kelas 13-14 tahun atas nama Adinda Putri (SMPN 13) pada kejuaraan tingkat Nasional kyokushin Grand Prix 6	
	KOTA SUKABUMI TERBAIK 1 PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TINGKAT NASIONAL	
	Kota Sukabumi mendapat penghargaan BK Award Tahun 2023 Implemtasi NSPK Manajemen ASN Terbaik	
	Bappeda Kota Sukabumi mendapat penghargaan Public Service Of The Year dari Markplus.Ins	
	Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi mendapat penghargaan Public Service Of The Year dari Markplus.Ins	
	penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	
	penghargaan Nirwasita Tantra kepada DPRD Kota Sukabumi untuk kategori Kota Sedang Terbaik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Pemkot Sukabumi sebagai Pemerintahan Kategori Kota Sedang Terbaik Dalam Pengelolaan Lingkungan	
	TERBAIK 1 PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT (PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN)	
	(SD NEGERI KIBITAY) Juara Harapan I NEMBANG PUPUH JENJANG SD	
	Juara I Kejuaraan Sepatu Roda & Skateboard PIALA WALIKOTA BEKASI 2020	
	(SDN DAYEUHLUHUR CBM) Juara I MTQ Pentas PAI	
	(SDN Baros Kencana CBM) Juara I Penampilan Terbaik Pencak Silat	
	(SDN BAROS KENCANA CBM) JUARA I TANDING PUTRA KELAS D USIA DINI	

Namun dibalik keberhasilan tersebut juga ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi RKPd triwulan IV tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian kinerja dan berimbas pada perencanaan pembangunan yang akan datang. Beberapa faktor penghambat tersebut diantaranya adalah:

1. Kesalahan penetapan indikator kegiatan dan program yang mengakibatkan sulit tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Kesalahan dalam mengevaluasi hasil kegiatan dan program sehingga tujuan utama pembangunan daerah tidak dapat tercapai. Dalam hal ini, secara umum proses evaluasi hanya dapat mendeteksi realisasi anggaran program dan kegiatan, dan belum mampu mengidentifikasi realisasi kinerja.
3. Saat ini belum adanya aplikasi/sistem E-Monev yang dapat secara otomatis melakukan interpretasi penilaian realisasi kinerja berdasarkan kriteria penilaian Permendagri nomor 86 Tahun 2017. Hal ini mengakibatkan proses interpretasi harus dilakukan secara manual terhadap seluruh kegiatan (RKPd 2020) sehingga tidak efisien. Idealnya sistem E-Monev dapat secara otomatis menghasilkan penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan, sehingga output evaluasi dapat

dengan cepat dihasilkan dan segera dapat ditindaklanjuti. Karena pada hakikatnya sistem E-Monev bukan sistem yang ditujukan untuk mengumpulkan angka dan data-data realisasi, melainkan sistem E-Monev harus mampu melakukan penilaian secara otomatis sehingga dapat memberikan informasi capaian kinerja yang berkualitas dan tepat waktu;

4.2 Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan RKPD berikutnya

Tindak lanjut atas hasil evaluasi RKPD 2023 Triwulan IV harus berpedoman pada metode penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Metode penilaian ini adalah melihat sejauh mana hasil capaian anggaran dan kinerja yang telah dilaksanakan. Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kriteria Sangat Tinggi dan Tinggi

Melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu guna mempertahankan capaian kinerja tinggi, melakukan telaah lebih teliti dan lebih mendalam terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi. Untuk menciptakan capaian kinerja keuangan yang tinggi juga didukung oleh penyelenggaraan sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Untuk Kriteria Sedang

Melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat dengan melakukan telaah terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan teknis seperti kerangka acuan kerja (KAK), jadwal (schedule) kegiatan, *time-line* rencana anggaran kas, standard operating procedure (SOP), dan lain-lain, agar hal-hal yang telah direncanakan dengan baik segera dapat diimplementasikan sesuai jadwal dan *time-line* dan anggaran kas yang telah direncanakan, dalam rangka mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

3. Untuk Kriteria Rendah

Melakukan tindakan – tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja, yaitu melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana program dan kegiatan termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam KAK dan SOP. Hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan dengan *schedule* dan *time-line* program dan kegiatan yang seharusnya, harus segera dikerjar dengan mengatasi beberapa masalah atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

4. Untuk Kriteria Sangat Rendah

Melakukan tindakan – tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya program dan kegiatan pembangunan daerah tidak berjalan sangat lambat, yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi dan pembinaan secara intensif antara semua pihak (Dinas, Badan, Biro, dll) yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, untuk

membangun kembali persamaan persepsi, persamaan tujuan, dan langkah dengan membangun kembali komitmen bersama semua pihak terkait.

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

RKPD Kota Sukabumi Triwulan IV Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan prioritas pada RKPD tahun 2023 disusun mengikuti prinsip *money follow output priority programs* dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD tahun 2023 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dalam pelaksanaan RKPD perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang kemudian akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya dan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota setiap triwulan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah (Wali Kota) dan Bappeda Provinsi.

Secara umum capaian kinerja pemerintah Kota Sukabumi belum dapat ditentukan hasilnya baik atau buruk karena masih tahun anggaran baru berjalan 3 bulan, namun diharapkan di triwulan berikutnya mulai terlihat hasil kinerja yang lebih baik sebagai *triger* untuk mendapatkan prestasi daerah yang lebih baik. Sebagai contoh Kota Sukabumi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan peringkat BB dalam penilaian Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) tingkat kabupaten/kota, diharapkan di tahun ini dan yang akan datang dapat lebih meningkat atau minimal mempertahankan nilainya sebagai bukti pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik. Salah satu indikator yang harus dicapai adalah realisasi anggaran dan kinerja di masing-masing perangkat daerah dapat kembali didominasi oleh kriteria sangat tinggi dan tidak ada satupun perangkat daerah yang termasuk dalam kriteria sedang atau dibawahnya.

Namun selain keberhasilan yang diperoleh secara umum juga ada beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian realisasi sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi Bappeda sebagai induk perencana tingkat daerah. Perlu adanya pendampingan yang melekat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatannya.

5.2 Rekomendasi

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan agar perencanaan pembangunan yang akan datang menjadi lebih baik, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam perspektif kedepan, perlu diperbaiki indikator kegiatan dan program agar sistem evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif, dan hasil evaluasi benar-benar dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan pengendalian yang sesuai dengan kondisi eksisting;
2. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, sehingga Bappeda hanya

mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja PD untuk menyusun evaluasi triwulanan RKPD. Dalam perspektif kedepan perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renjanya masing-masing dengan data yang akurat, tepat waktu dan berkualitas;

3. Perlu dibangunnya aplikasi/sistem E-Monev yang dapat secara otomatis menghasilkan penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan, sehingga output evaluasi dapat dengan cepat dihasilkan dan segera dapat ditindaklanjuti. Karena pada hakikatnya sistem E-Monev bukan sistem yang ditujukan untuk mengumpulkan angka dan data-data realisasi, melainkan sistem E-Monev harus mampu melakukan penilaian secara otomatis sehingga dapat memberikan informasi capaian kinerja yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		876,196,581,489.00	849,913,746,988.00	91.63	92.35	91.28	98.63
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		251,741,771,729.00	247,559,644,192.00	98.34	76.25	71.81	94.18
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		251,741,771,729.00	247,559,644,192.00	98.34	76.25	71.81	94.18
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171,416,931,179.00	167,969,358,637.00	97.99	100.00	97.99	97.99
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		80,238,550,750.00	79,504,035,755.00	99.08	100.00	99.10	99.10
		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 tahun yang beartisipasi dalam Pendidikan Dasar						
		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 tahun yang beartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama						
		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang beartisipasi dalam PAUD						
		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah yang beartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan						
		Persentase GTK yang berkualifikasi DIV/S1						
		Persentase GTK yang bersertifikasi						
		jumlah GTK berprestasi						
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rata-Rata Indeks Pemerataan Guru	59,889,800.00	59,889,800.00	60.01	15.00	0.15	100.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Hasil publikasi Bahasa dan Sastra Daerah yang di Apresiasi	26,400,000.00	26,360,000.00	99.85	90.00	90.00	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		497,451,676,739.00	476,830,750,414.00	95.85	100.00	98.57	98.57
	Dinas Kesehatan		497,451,676,739.00	476,830,750,414.00	95.85	100.00	98.57	98.57
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	412,460,863,013.00	401,350,957,375.00	97.31	100.00	95.83	95.83
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	78,859,053,295.00	69,532,416,123.00	88.17	100.00	97.00	97.00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,217,581,856.00	2,069,579,456.00	93.33	100.00	100.00	100.00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan obat dan makanan	370,356,000.00	367,962,560.00	99.35	100.00	100.00	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelayanan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar	3,543,822,575.00	3,509,834,900.00	99.04	100.00	100.00	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN							
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		102,177,748,665.00	101,460,424,829.00	82.01	71.09	69.47	97.72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	13,759,097,195.00	13,536,674,504.00	98.38	90.00	70.59	78.43
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun dalam kondisi baik	5,676,876,004.00	5,806,911,126.00	98.81	100.00	100.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
		Persentase KK Akses Air minum aman	2,136,249,800.00	2,100,847,150.00	98.34	99.00	99.00	100.00
		Persentase penduduk berakses air minum yang layak				100.00	100.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
		Persentase KK lumpur tinja yang terlayani	6,620,278,900.00	6,572,979,005.00	99.29	34.00	34.00	100.00
		Persentase warga mengakses sanitasi				74.00	74.00	100.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kondisi jalan lingkungan baik	7,437,390,150.00	7,279,844,046.00	97.88	47.00	47.00	100.00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan negara sesuai dengan standar kelayakan	4,663,206,500.00	4,591,054,013.00	98.45	20.00	20.00	100.00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
		Persentase Jumlah Kondisi Taman yang baik	3,404,772,000.00	3,381,031,050.00	99.30	86.22	86.22	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang jalan kota kondisi yang Mantap	58,132,387,100.00	57,861,123,915.00	99.53	82.85	82.85	100.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian jumlah pelaku sektor jasa	50,000,000.00	50,000,000.00	100	40.00	40.00	100.00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		297,491,016.00	279,960,020.00	94.11	80.00	80.00	100.00
	Persentase Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)						
	Persentase Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata						
	Persentase Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang						
	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk						
	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN							
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		1,179,346,570.00	1,171,875,310.00	79.51	99.12	99.12	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	140,285,970.00	140,225,400.00	99.95	98.90	98.90	100.00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan kawasan kumuh	405,225,000.00	398,478,500.00	98.34	100.00	100.00	100.00
	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni				98.90	98.90	100.00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	545,035,600.00	545,015,600.00	100.00	98.90	98.90	100.00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	88,800,000.00	88,155,810.00	99.27	98.90	98.90	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran		12,007,840,038.00	11,516,923,465.00	91.61	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	10,297,783,088.00	10,188,789,465.00	98.94	100.00	100.00	100.00
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	1,599,407,500.00	1,217,773,000.00	76.14	100.00	100.00	100.00
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Persentase Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran - Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran - Persentase Penyelamatan Non Kebakaran	110,649,450.00	110,361,000.00	99.74	100.00	100.00	100.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3,584,587,590.00	3,569,431,271.00	99.23	100.00	99.96	99.96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	3,214,785,040.00	3,204,066,071.00	99.67	100.00	99.92	99.92
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	369,802,550.00	365,365,200.00	98.80	100.00	100.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
Dinas Sosial		8,053,610,158.00	7,804,697,507.00	94.84	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	4,572,572,448.00	4,489,351,930.00	98.18	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya	2,283,577,200.00	2,238,227,200.00	98.01	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100.00	100.00	100.00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	802,756,550.00	715,936,617.00	89.18	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan layanan Perlindungan	284,743,900.00	264,871,700.00	93.02	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan	93,845,060.00	80,195,060.00	85.45	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	14,615,000.00	14,615,000.00	100	100.00	100.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
Dinas Tenaga Kerja		3,881,256,980.00	3,712,725,276.00	91.24	83.75	83.75	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	3,354,407,080.00	3,327,947,876.00	99.21	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	429,700,000.00	288,490,000.00	67.14	80.00	80.00	100.00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja	28,000,000.00	27,937,500.00	99.78	80.00	80.00	100.00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga	69,149,900.00	68,349,900.00	98.84	75.00	75.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan		7,843,982,235.00	7,583,539,916.00	90.13	87.14	87.14	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	6,292,954,375.00	6,214,185,894.00	98.75	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Persentase Penguatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender	169,269,700.00	165,210,222.00	97.60	40.00	40.00	100.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan	524,883,860.00	521,171,500.00	99.29	85.00	85.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Terpilah Gender	25,000,000.00	25,000,000.00	100	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan	244,265,100.00	193,521,100.00	79.23	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	68,740,000.00	52,715,000.00	76.68	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase layanan perlindungan khusus anak	518,869,200.00	411,736,200.00	79.35	85.00	85.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		9,955,589,544.00	9,857,468,453.00	99.78	67.80	69.63	102.69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	9,574,050,094.00	9,476,180,503.00	98.98	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka ketersediaan cadangan pangan di masyarakat	17,760,100.00	17,760,100.00	100	10.00	10.00	100.00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan pokok Pemerintah	341,834,950.00	341,583,450.00	99.93	40.00	49.13	122.83
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan data kerawanan pangan	15,195,000.00	15,195,000.00	100	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan	6,749,400.00	6,749,400.00	100	89.00	89.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
Dinas Lingkungan Hidup		31,202,248,952.00	30,995,077,965.00	112.16	78.13	75.00	96.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	25,440,868,602.00	25,273,323,588.00	99.34	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		167,286,250.00	167,286,250.00	100	100.00	100.00	100.00
	Persentase pencapaian perencanaan lingkungan hidup						
	Persentase ketersediaan informasi kinerja pengelolaan Lingkungan						
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		167,587,300.00	167,471,117.00	99.93	48.50	48.50	100.00
	Persentase pengendalian pencemaran air						
	Persentase pengendalian pencemaran udara						
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	435,477,500.00	430,558,300.00	98.87	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	8,745,000.00	8,745,000	99.94	12.00	12.00	100.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	64,167,050.00	64,167,050.00	100	100.00	75.00	75.00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN							
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK		22,874,850.00	22,874,850.00	100	14.00	14.00	100.00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	82,429,800.00	82,379,800.00	99.94	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		4,812,812,600.00	4,778,272,010.00	99.28	50.50	50.50	100.00
	Persentase pengurangan sampah						
	Persentase penanganan Sampah						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8,046,276,788.00	8,011,085,541.00	99.87	100.00	97.50	97.50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,556,618,038.00	7,521,636,291.00	99.54	100.00	87.50	87.50
II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan dokumen pendaftaran penduduk	405,543,150.00	405,371,150.00	99.96	100.00	100.00	100.00
III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	44,490,600.00	44,490,600.00	100	100.00	100.00	100.00
IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	30,250,000.00	30,212,500.00	99.88	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan	9,375,000.00	9,375,000.00	100	100.00	100.00	100.00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan		5,001,024,525.00	4,944,976,728.00	98.96	76.18	72.94	95.75

	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA							
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA							
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan	287,452,000.00	284,652,000.00	99.03	85.00	71.65	84.29
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera II	2,149,066,150.00	2,139,725,150.00	99.57	76.00	76.00	100.00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		2,564,506,375.00	2,520,599,578.00	98.28790455	67.53	71.17	105.39
		1) Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB;						
		2) Usia Nikah Pertama						
		3) Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP;						
		4) Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
	Dinas Perhubungan		17,991,411,166.00	17,608,699,473.00	97.77	90.50	89.74	99.15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	15,205,295,966.00	14,889,042,539.00	97.92	100.00	98.47	98.47
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2,786,115,200.00	2,719,656,934.00	97.61	81.00	81.00	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Dinas Komunikasi dan Informatika		5,799,575,831.00	5,735,322,515.00	97.66	88.33	91.11	103.14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	5,251,742,881.00	5,195,315,413.00	98.93	100.00	100.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk	434,593,250.00	433,117,402.00	99.66	90.00	90.00	100.00
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk	113,239,700.00	106,889,700.00	94.39	75.00	83.33	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN							
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan		12,657,412,755.00	12,297,276,922.00	98.78	167.02	159.16	95.29
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintah	8,317,941,225.00	8,073,987,142.00	97.07	100.00	99.17	99.17
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kebutuhan Monitoring dan Evaluasi Perkoperasian	1,229,050.00	1,229,050	100	100.00	100.00	100.00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Dokumen yang difasilitasi	6,851,100.00	6,801,100.00	99.27	100.00	50.00	50.00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	531,236,000.00	531,235,100.00	100	64.00	64.74	101.16
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	81,400,000.00	80,100,000.00	98.4	19.00	14.05	73.95
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN		3,718,755,380.00	3,603,924,530.00	96.91	86.15	86.15	100.00
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha						
		UMKM Naik Kelas						
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan						
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program	464,500,000.00	463,500,000.00	99.78	700.00	700.00	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5,416,402,958.00	5,326,247,584.00	98.13	100.00	95.40	95.40
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,232,485,573.00	4,163,793,516.00	98.38	100.00	97.63	97.63
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	657,909,885.00	649,100,168.00	98.66	100.00	100.00	100.00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang Berinvestasi	72,664,600.00	71,164,600.00	97.94	100.00	83.33	83.33
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang Diterbitkan	89,192,900.00	85,539,300.00	95.90	100.00	91.42	91.42
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berkala Nasional (PMDN/PMA)	354,700,000.00	347,200,000.00	97.89	100.00	100.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Jumlah Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah yang	9,450,000.00	9,450,000.00	100	100.00	100.00	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		14,774,617,552.00	14,634,327,993.00	98.95	100.00	98.95	98.95

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi	6,177,539,052.00	6,058,102,206.00	98.07	100.00	99.85	99.85
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	906,225,000.00	896,627,072.00	98.94	100.00	100.00	100.00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan	7,690,853,500.00	7,679,598,715.00	99.85	100.00	97.00	97.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
Dinas Komunikasi dan Informatika		29,658,000.00	29,658,000.00	100.00	60.00	68.75	114.58
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Termanfaatkannya Data dan informasi statistik sektoral pemerintah	29,658,000.00	29,658,000.00	100	60.00	68.75	114.58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		108,962,850	108,132,850	99	60.00	60.00	100.00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya indeks keamanan informasi pemerintah daerah	108,962,850.00	108,132,850.00	99.24	60.00	60.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		328,439,950.00	306,326,150.00	95.62	89.50	88.28	98.64
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan di kembangkan	57,549,450.00	57,509,450.00	99.93	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		140,358,700.00	120,358,700.00	85.75	100.00	95.14	95.14
	Persentase Komunitas Seni yang berbadan hukum						
	Jumlah kesenian daerah yang dilestarikan						
	Persentase komunitas seni berbadan hukum yang mendapatkan hibah						
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	65,531,800.00	65,500,000.00	99.95	78.00	78.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum Kota Sukabumi yang Representatif	65,000,000.00	62,958,000.00	96.85	80.00	80.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		4,954,557,878.00	4,925,321,457.00	99.57	66.00	66.00	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah	4,567,991,898.00	4,539,668,085.00	99.38	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	386,565,980.00	385,653,372.00	99.76	32.00	32.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		140,701,750.00	132,701,650.00	94.31	64.00	64.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti	140,701,750.00	132,701,650.00	94.31	64.00	64.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
		9,917,830,978.00	9,683,102,371.00	97.91	80.87	76.20	93.72
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		641,189,350.00	638,915,150.00	99.79	33.57	28.39	84.57
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas Budidaya Perikanan	570,764,650.00	568,505,150.00	99.60	24.83	25.67	103.38
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	70,424,700.00	70,410,000.00	99.98	42.31	31.11	73.53
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		1,603,103,000.00	1,596,295,385.00	99.76	96.25	96.25	100.00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah pengunjung ke destinasi wisata	714,320,000.00	707,597,401.00	99.06	85.00	85.00	100.00
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah event yang diselenggarakan	116,835,500.00	116,835,500.00	100	100.00	100.00	100.00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	66,947,500.00	66,942,500.00	99.99	100.00	100.00	100.00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi	Jumlah Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	705,000,000.00	704,919,984.00	99.99	100.00	100.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		2,627,667,228.00	2,603,016,936.00	99.45	65.40	66.52	101.71

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi padi	1,346,347,750.00	1,330,788,448.00	98.84	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	804,769,913.00	797,983,008.00	99.16	40.00	45.60	114.00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	307,584,965.00	305,280,880.00	99.25	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi	8,629,750.00	8,629,750.00	100	80.00	80.00	100.00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	160,334,850.00	160,334,850.00	100	7.00	7.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan		2,575,518,300.00	2,510,500,300.00	90.66	100.00	76.05	76.05
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		2,474,330,050.00	2,414,277,350.00	97.57	100.00	64.98	64.98
	Persentase Pengawasan Pembangunan Pasar						
	Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang						
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Persentase Pemanfaatan Profil, Informasi Harga dan Pengawasan	4,263,750.00	3,652,750.00	85.67	100.00	58.33	58.33
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	10,800,000.00	8,879,000.00	82.21	100.00	100.00	100.00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	86,124,500.00	83,691,200.00	97.17	100.00	80.89	80.89
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan		2,434,253,600.00	2,298,373,600.00	98.05	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2,327,795,000.00	2,191,915,000.00	94.16	100.00	100.00	100.00
	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota						
	Cakupan bina kelompok pengrajin						
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	48,432,000.00	48,432,000.00	100	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	58,026,600.00	58,026,600.00	100	100.00	100.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
Dinas Tenaga Kerja		36,099,500	36,001,000	100	90	90	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi	36,099,500	36,001,000	99.73	90.00	90.00	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pemahaman animo masyarakat tentang transmigrasi						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
Sekretariat Daerah		57,236,235,624	55,650,358,900	97.00	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		39,059,735,044	38,234,099,544	97.89	100.00	100.00	100.00
	Persentase Layanan Keprotokolan						
	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Memenuhi Aspek Penilaian						
	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Persentase dokumen Perencanaan, laporan kinerja tepat waktu						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		17,550,408,940	16,806,725,734	95.76	100.00	100.00	100.00
	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk perundang-undangan, Peraturan Hukum dan HAM serta Dokumentasi Hukum						
	Persentase Kegiatan Keagamaan Swadaya Masyarakat						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		626,091,640	609,533,622	97.36	100.00	100.00	100.00
	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD						
	Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perencanaan Daerah						
	Persentase Level Maturitas Pelayanan PBJ						
Sekretariat DPRD		60,077,987,238	56,881,932,813	95.98	100.00	97.15	97.15

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	42,523,811,588	39,483,226,037	92.85	100.00	100.00	100.00
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	17,554,175,650	17,398,706,776	99.11	100.00	94.29	94.29
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		14,881,084,025	14,382,277,124	97.95	93.33	93.33	100.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,203,794,925	9,747,527,470	95.53	80.00	80.00	100.00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1,950,711,950	1,943,239,849	99.62	100.00	100.00	100.00
	1. Persentase dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan						
	2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD						
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		2,726,577,150	2,691,509,805	98.71	100.00	100.00	100.00
	1. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen						
	2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen						
	3. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen						
KEUANGAN		57,244,122,977	54,977,295,050	95	100	98	98
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		57,244,122,977	54,977,295,050	94.83	100.00	97.50	97.50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	42,118,097,918	40,184,558,203	95.41	90.00	90.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9,788,136,709	9,713,704,225	99.24	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib	1,498,968,850	1,287,788,703	85.91	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah	3,838,919,500	3,791,243,919	98.76	100.00	100.00	100.00
KEPEGAWAIAN		7,454,019,586	7,269,134,851	96	100	93	93
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		7,454,019,586	7,269,134,851	95.95	100.00	92.91	92.91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	5,922,989,736	5,805,149,376	98.01	100.00	98.72	98.72
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang profesional	575,027,150	529,551,080	92.09	90.00	90.00	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase meningkatnya kompetensi ASN	956,002,700	934,434,395	97.74	90.00	90.00	100.00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1,209,698,400	1,202,749,680	99	33	33	100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1,209,698,400	1,202,749,680	99.43	32.50	32.50	100.00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1,209,698,400	1,202,749,680	99.43	32.50	32.50	100.00
	1. Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi						
	2. Presentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi						
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		9,128,251,773	9,064,045,820	100	77	99	129
INSPEKTORAT DAERAH							
Inspektorat Daerah		9,128,251,773	9,064,045,820	99.61	76.67	99.00	129.13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	7,726,902,918	7,667,330,537	99.23	70.00	70.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		256,395,000	256,220,165	99.93	70.00	60.00	85.71
	1. Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti	151,765,000	151,390,699	99.75	45.00	76.00	168.89
	2. Tindak lanjut temuan BPK RI	240,302,500	239,097,163	99.50	45.00	85.00	188.89
	3. Tindak lanjut temuan APIP						
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN		367,385,500	366,176,996	99.67	3	3.00	100.00
	1. Leveling Kapabilitas Aparat Pengawassan Intern Pemerintah (APIP)	385,500,855	383,830,260	99.57	3	3.00	100.00
	2. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
UNSUR KEWILAYAHAN		71,086,949,690	70,110,195,825	99	96	96	100

KECAMATAN		71,086,949,690	70,110,195,825	99	96	96	100
Kecamatan Cikole		12,511,893,818	12,407,281,276	99.61	100.00	99.70	99.70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,255,815,868	8,160,176,400	98.84	100.00	98.81	98.81
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1,884,580,500	1,884,477,643	99.99	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	2,300,333,850	2,291,463,633	99.61	100.00	100.00	100.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	71,163,600	71,163,600	100.00	100.00	100.00	100.00
Kecamatan Gunung Puyuh		9,785,452,579	9,572,300,674	99.18	100.00	99.71	99.71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,674,128,229	6,467,502,257	96.90	100.00	99.74	99.74
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1,453,042,100	1,452,969,100	99.99	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	1,576,048,250	1,570,016,517	99.62	100.00	99.42	99.42
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	66,844,000	66,422,800	99.37	100.00	99.37	99.37
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	15,390,000	15,390,000	100.00	100.00	100.00	100.00
Kecamatan Citamiang		10,378,608,685	10,236,432,626	99.49	100.00	99.42	99.42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,470,494,635	7,332,644,461	98.15	100.00	97.11	97.11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1,226,365,950	1,226,102,447	99.98	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	1,625,799,900	1,621,769,120	99.75	100.00	100.00	100.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	54,718,200	54,691,598	99.95	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1,230,000	1,225,000	99.59	100.00	100.00	100.00
Kecamatan Warudoyong		10,914,648,303	10,792,170,135	99.13	75.00	75.00	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,306,781,653	7,202,982,066	98.58	90.00	90.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1,608,654,950	1,606,260,648	99.85	85.00	85.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	1,894,926,500	1,879,614,223	99.19	40.00	40.00	100.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	49,597,200	48,625,198	98.04	60.00	60.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	54,688,000	54,688,000	100.00	100.00	100.00	100.00
Kecamatan Baros		8,258,347,594	8,108,041,482	98.37	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,770,659,844	5,631,238,790	97.58	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1,177,172,350	1,175,974,900	99.90	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	1,251,454,550	1,243,845,712	99.39	100.00	100.00	100.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	41,559,050	39,483,230	95.01	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	17,501,800	17,498,850	99.98	100.00	100.00	100.00
Kecamatan Lembur Situ		10,029,232,742	9,916,113,828	99.20	100.00	99.93	99.93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,864,193,060	6,758,893,156	98.47	100.00	99.64	99.64

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1,459,688,750	1,459,648,850	100.00	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	1,643,329,332	1,636,340,885	99.57	100.00	100.00	100.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	47,921,600	47,210,937	98.52	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	14,100,000	14,020,000	99.43	100.00	100.00	100.00
Kecamatan Cibeureum		9,208,765,969	9,077,855,804	98.47	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,581,848,994	6,457,336,335	98.11	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	31,812,500	31,812,500	100.00	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1,184,889,275	1,184,863,950	100.00	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	1,365,703,200	1,361,763,613	99.71	100.00	100.00	100.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	44,512,000	42,079,406	94.53	100.00	100.00	100.00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		21,565,376,428	21,360,004,605	97.51	100.00	85.03	85.03
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		21,565,376,428	21,360,004,605	97.51	100.00	85.03	85.03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,705,161,706	3,631,965,433	98.02	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terwujudnya wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan	919,206,183	884,195,633	96.19	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatannya kehidupan berkualitas melalui penerapan nilai-nilai agama dan wawasan kebangsaan	859,104,039	857,189,039	99.78	100.00	100.00	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat	746,829,100	681,829,100	91.30	100.00	89.74	89.74
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan lembaga non pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Sukabumi	351,800,000	351,800,000	100.00	100.00	74.90	74.90
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Tingkat Kewaspadaan Dini dalam penanganan konflik sosial di masyarakat	14,983,275,400	14,953,025,400	99.80	100.00	45.56	45.56